



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018



*Mewujudkan Masyarakat Klaten yang:
Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.*

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

Jl. Pemuda Nomor 294, Gd. Pemda I

Telp. (0272) 321046 Ps.486.Faks.(0272)325367

KLATEN – 57424

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun sebagai suatu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Negara Pemdayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. **Maksud dan tujuan Penyusunan LKjIP adalah untuk:** (a) meningkatkan akuntabilitas Kinerja OPD, (b) sebagai umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah, (c) mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi, (d) mendorong OPD untuk melaksanakan tata penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan (e) menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efisien dan efektif, serta responsif terhadap issue yang berkembang.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten beserta analisis dan evaluasi sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kinerja instansi secara terus menerus guna menjamin berkelanjutan tata penyelenggaraan pemerintah diukur dari pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, serta untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten **Klaten Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.**

Klaten, 28 Maret 2019

 **BUPATI KLATEN,**

SRI MULYANI



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
INSPEKTORAT

Jalan Pemuda Selatan No.4 Telp. 321040 Kode Pos 57412
K L A T E N

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Daerah untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerinta Daerah Kabupaten Klaten.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Klaten, 28 Maret 2019



PI. INSPEKTUR KABUPATEN KLATEN

Drs. PURWANTO ANGGONO CIPTO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP . 19590901 198603 1 016
Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Executive Summary

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, di mana Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 ditetapkan 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 58 (lima puluh delapan) indikator yang sifatnya progresif, dan 9 (sembilan) indikator yang sifatnya represif.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan RPJMD, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tahun 2018, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Klaten Tahun 2018 tercatat sebanyak 173 program dengan 987 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 87,78% dari target rencana. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.1.018.676.084.121,98 dan terserap sebesar Rp.859.618.219.315,88 (atau 84,39%).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 58 (lima puluh delapan) indikator yang sifatnya progresif, dan 9 (sembilan) indikator yang sifatnya represif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

A. **Indikator Progresif**, dengan hasil:

- a. Sebanyak 46 (enam puluh enam) Indikator Kinerja sasaran atau sebanyak 79,31% dengan Kriteria **Sangat Tinggi**;
- b. Sebanyak 7 (tujuh) atau sebanyak 12,07% dengan Kriteria **Tinggi**;

- c. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 1,72% dengan Kriteria **Sedang**;
- d. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 1,72% dengan Kriteria **Rendah**; dan
- e. Sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 5,17% dengan Kriteria **Sangat Rendah**. Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas:

- a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria **sangat tinggi**, atau interval nilai realisasi kinerja $\geq 90,1$ sebanyak 46 (*empat puluh enam*), diantaranya:
 - 1. Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 - 2. Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Usia Harapan Hidup;
 - 4. Persentase penguatan kapasitas PSKS;
 - 5. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
 - 6. Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda;
 - 7. Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga;
 - 8. Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan;
 - 9. Persentase Kenaikan Kunjungan Masyarakat;
 - 10. Indeks Profesionalitas ASN;
 - 11. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 12. Persentase Raperda yang Disahkan Tepat Waktu;
 - 13. Tingkat Konsistensi dan Ketepatan Waktu Perencanaan;
 - 14. Persentase Kenaikan SKPD Mengelola Arsip Secara Baku;
 - 15. Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel;
 - 16. Level Maturitas SPIP;
 - 17. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 - 18. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
 - 19. Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara;
 - 20. Indeks Kabupaten Peduli HAM;
 - 21. Persentase Kesesuaian Capaian Pelaksanaan Pembangunan (Fisik dan Keuangan) dengan Target (rencana);

22. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik yang Sesuai Regulasi;
23. Persentase Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Kepala Daerah;
24. Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah;
25. Persentase Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah;
26. Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesra;
27. Persentase Desa yang Memiliki LEM, LED dan Posyantek;
28. Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pariwisata;
29. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB;
30. Persentase UMKM yang Memiliki Daya Saing;
31. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA);
32. Angka Partisipasi Angkatan Kerja;
33. Besaran Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan;
34. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB;
35. Indeks Layanan Infrastruktur;
36. Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan;
37. Ketaatan Terhadap RTRW;
38. Kelas Indeks Kapasitas Bencana;
39. Indeks Demokrasi;
40. Rata - rata Kader Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Sosial Budaya yang Aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan);
41. Indeks Ketertiban Masyarakat;
42. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
43. Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
44. Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan;
45. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat; dan
46. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.

b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***tinggi***, atau interval nilai realisasi kinerja **$75,1 \leq 90$** sebanyak 7 (tujuh), diantaranya:

1. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;
2. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB;
3. Persentase Inovasi yang Diterapkan;
4. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA;
5. Kelas Indeks Kapasitas Bencana;

6. Rasio Penduduk yang Bekerja; dan
 7. Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- c. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***sedang***, atau interval nilai realisasi kinerja $65,1 \leq 75$ sebanyak 1 (satu), yaitu Level Kapabilitas APIP.
- d. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***rendah***, atau interval nilai realisasi kinerja $50,1 \leq 65$ sebanyak 1 (satu), yaitu Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya.
- e. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***sangat rendah***, atau interval nilai realisasi kinerja ≤ 50 sebanyak 3 (tiga), diantaranya:
1. Rasio daya serap tenaga kerja PMDN;
 2. Persentase IKM yang memiliki daya saing; dan
 3. Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi.

B. **Indikator Regresif**, dengan hasil: Sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 100% dengan Kriteria ***Baik (Berhasil Menekan)***, yaitu:

1. Kasus Kematian Ibu;
2. Kasus Kematian Bayi;
3. Kasus Kematian Balita;
4. Prevalensi Gizi Buruk (BB/U);
5. Tingkat Inflasi YoY;
6. Indeks Kualitas Air;
7. Indeks Kualitas Udara;
8. Indeks Tutupan Vegetasi (lahan); dan
9. Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*) /TFR.

Evaluasi atas data pendukung beserta berbagai permasalahan yang muncul dari setiap sasaran strategis perlu diantisipasi. Sebab sekalipun realisasi kinerja menunjukkan hasil sangat baik, di lapangan belum tentu menjawab isu-isu pembangunan secara tuntas. Sehingga kehadiran pemerintah harus selalu ada disaat-saat masyarakat memerlukan pelayanan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Pernyataan Telah Direviu	iii
Executive Summary	iv
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Grafik.....	xvi
Daftar Diagram	xviii
Daftar Gambar.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Tren Wilayah.....	I-2
1.3 Kondisi Ekonomi Daerah.....	I-9
1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten.....	I-14
1.5 Isu Startegis.....	I-16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1 Rencana Strategis	II-1
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018	II-15
2.3 Program Pendukung Pencapaian Sasaran.....	II-19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	III-2
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	III-10
3.3 Akuntabilitas Anggaran	III-138
BAB IV PENUTUP	IV-1
4.1 Kesimpulan.....	IV-1
4.2 Rencana Tindak Lanjut	IV-2
Lampiran I Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Klaten Tahun 2018	
Lampiran II Struktur Pemerintah Kabupaten Klaten	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rasio Beban Tanggungan (RBT) Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018	I-4
Tabel 1.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten 2014 - 2018	I-6
Tabel 1.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	I-7
Tabel 1.4	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018	I-11
Tabel 1.5	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018	I-12
Tabel 1.6	Pejabat Struktural Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018.....	I-15
Tabel 1.7	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat, Bintek dan Seminar tahun 2014 – 2018.....	I-16
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021.....	II-9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2018.....	II-15
Tabel 2.3	Program Pendukung Pencapaian Sasaran.....	II-19
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif.....	III-2
Tabel 3.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif.....	III-2
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018	III-3
Tabel 3.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal	III-11
Tabel 3.5	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014 – 2018 ...	III-13
Tabel 3.6	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014 -2018	III-14
Tabel 3.7	Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2014 -2018	III-14
Tabel 3.8	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018.....	III-17

Tabel 3.9	Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV dan Bersertifikat menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014–2018.....	III-17
Talle 3.10	Jumlah Sekolah Murid, Guru SD Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018.....	III-18
Tabel 3.11	Jumlah Sekolah Murid, Guru SD Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018.....	III-19
Tabel 3.12	Jumlah Sekolah Murid, Guru SMP Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018.....	III-20
Tabel 3.13	Jumlah Sekolah Murid, Guru SMP Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018.....	III-21
Tabel 3.14	Perkembangan Angka Melanjutkan Seolah dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018 ..	III-23
Tabel 3.15	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik	III-23
Tabel 3.16	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan	III-26
Tabel 3.17	Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018.....	III-27
Tabel 3.18	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitian oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit.....	III-31
Tabel 3.19	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM	III-35
Tabel 3.20	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Menurunnya Angka Kelahiran (Total Fertility Rate)	III-37
Tabel 3.21	Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018.....	III-38
Tabel 3.22	Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-38
Tabel 3.23	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.....	III-40
Tabel 3.24	Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-41
Tabel 3.25	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam	

	Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Bunda Cagar Budaya ..	III-42
Tabel 3.26	Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-43
Tabel 3.27	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-44
Tabel 3.28	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	III-45
Tabel 3.29	Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-46
Tabel 3.30	Perkembangan Jumlah Perpustakaan Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-46
Tabel 3.31	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.....	III-47
Tabel 3.32	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	III-49
Tabel 3.33	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	III-49
Tabel 3.34	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan dan akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD.....	III-51
Tabel 3.35	Capaian Kinerja Organisasi Berdasarkan Pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2018	III-51
Tabel 3.36	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.....	III-53
Tabel 3.37	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	III-54
Tabel 3.38	Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-55
Tabel 3.39	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesioanl, Transparan dan Akuntabel	III-56
Tabel 3.40	Lembaga Ekonomi Perdesaan	III-57
Tabel 3.41	Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2014-2018.....	III-57
Tabel 3.42	Lokasi Pengembangan Wisata.....	III-59
Tabel 3.43	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	III-61

Tabel 3.44	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Penyelenggraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.....	III-67
Tabel 3.45	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM.....	III-68
Tabel 3.46	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	III-70
Tabel 3.47	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel	III-71
Tabel 3.48	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan	III-72
Tabel 3.49	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian	III-73
Tabel 3.50	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat.....	III-75
Tabel 3.51	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	III-76
Tabel 3.52	Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018.....	III-77
Tabel 3.53	Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018.....	III-78
Tabel 3.54	Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018.....	III-79
Tabel 3.55	Perkembangan Produksi dan Produktifitas Tahun 2014-2018.....	III-79
Tabel 3.56	Produksi Perkebunan Tahun 2014-2018	III-80
Tabel 3.57	Produksi Ternak Tahun 2014-2018	III-80
Tabel 3.58	Produksi Susu, Daging dan Telur Tahun 2014-2018.....	III-81
Tabel 3.59	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan.....	III-83
Tabel 3.60	Lembaga Ekonomi Perdesaan	III-84
Tabel 3.61	Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2014-2018.....	III-84

Tabel 3.62	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataaan	III-86
Tabel 3.63	Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten Tahun 2018.....	III-87
Tabel 3.64	Jumlah Obyek Wisata, pengunjung, Lama Tinggal dan rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2014-2018	III-89
Tabel 3.65	Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-90
Tabel 3.66	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	III-91
Tabel 3.67	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah.....	III-93
Tabel 3.68	Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten.....	III-94
Tabel 3.69	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal.....	III-97
Tabel 3.70	Jumlah Investasi PMA dan PMDN Tahun 2014-2018	III-97
Tabel 3.71	Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2014-2018.....	III-98
Tabel 3.72	Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2014-2018	III-98
Tabel 3.73	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing, Sektor Ketenagakerjaan	III-99
Tabel 3.74	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan.....	III-102
Tabel 3.75	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian	III-104
Tabel 3.76	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Insfrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat.....	III-106
Tabel 3.77	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan.....	III-108
Tabel 3.78	Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018.....	III-108
Tabel 3.79	Data Terminal Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Klaten Tahun 2018	III-109

Tabel 3.80	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman	III-110
Tabel 3.81	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai Dengan Konsep Tata Ruang	III-112
Tabel 3.82	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terjaganya Kualitas Lingkungan	III-114
Tabel 3.83	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pengurangan kerentanan Risiko Bencana.....	III-117
Tabel 3.84	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi.....	III-119
Tabel 3.85	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat Dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya	III-120
Tabel 3.86	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	III-122
Tabel 3.87	Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2014-2018	III-123
Tabel 3.88	Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras / Beralkohol Tahun 2014-2018	III-124
Tabel 3.89	Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum Tahun 2014-2018	III-124
Tabel 3.90	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	III-127
Tabel 3.91	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-127
Tabel 3.92	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-128
Tabel 3.93	Keikutsertaan Perempuan di dalam Jabatan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018.....	III-129
Tabel 3.94	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-130
Tabel 3.95	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan	III-131
Tabel 3.96	Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018.....	III-131

Tabel 3.97	Data terminal Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-132
Tabel 3.98	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu Yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat.....	III-133
Tabel 3.99	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas	III-134
Tabel 3.100	Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-135
Tabel 3.101	Penduduk kabupaten Klaten yang Belum ber-Akte lahir dan KTP Elektronik Tahun 2014-2018	III-136
Tabel 3.102	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pengembangan Ketrasmigrasian	III-137
Tabel 3.103	Realisasi Penempatan Transmigrasi Umum Menurut Daerah Penempatan Tahun 2014-2018	III-137
Tabel 3.104	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018	III-141

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018	I-5
Grafik 1.2	Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2014 - 2018	I-7
Grafik 1.3	Perkembangan Relevansi Indeks Kedalamam Kemiskinan (pP1) Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah	I-8
Grafik 1.4	Perkembangan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2014 - 2018.....	I-8
Grafik 1.5	Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan nasional Tahun 2014-2018.....	I-9
Grafik 1.6	Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	I-14
Grafik 1.7	Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2013 - 2018.....	I-15
Grafik 3.1	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018	III-11
Grafik 3.2	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2014 - 2018.....	III-12
Grafik 3.3	Angka Kelulusan (AL) Tahun 2014 - 2018	III-15
Grafik 3.4	Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 tahun ke Atas di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018.....	III-16
Grafik 3.5	Perkembangan Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018.....	III-27
Grafik 3.6	Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018.....	III-29
Grafik 3.7	Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018.....	III-30
Grafik 3.8	Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2014 - 2018.....	III-33
Grafik 3.9	Indikator BOR (Persentase Pemakaian Tempat Tidur pada Satuan Waktu Tertentu Menurut Bulan Tahun 2018)	III-34
Grafik 3.10	Indikator BOR (Persentase Pemakaian Tempat Tidur pada Satuan Waktu Tertentu Tahun 2016-2018)	III-34
Grafik 3.11	PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2014-2018	III-37

Grafik 3.12	Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018	III-76
Grafik 3.13	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	III-118
Grafik 3.14	Capaian Konservasi Penghijauan Daerah Sumber Mata Air Kabupaten Klaten Tahun 2016-2017 dan Target sampai Tahun 2021	III-119

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1	Korelasi Antara Tujuan dan Misi Pembangunan Daerah.....	II-13
Diagram 3.1	Peringkat Kinerja Progresif	III-9
Diagram 3.2	Peringkat Kinerja Regresif	III-10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Aministrasi Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan	I-3
------------	---	-----



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan menuntut adanya pengelolaan atau manajemen pemerintahan yang baik. Manajemen pemerintahan yang baik bermuara pada terwujudnya *good governance* yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan-kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan masyarakat dan daya saing daerah (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Disamping itu, tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif, serta memiliki pendapatan per kapita untuk hidup layak(*Human Development Report*, 1990).

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka harus disusun *grand-design* perencanaan yang terpadu dari berbagai sektor, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehingga perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional harus dilaksanakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan pelaporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu penguatan pelaksanaan *otonomi daerah* dalam upaya peningkatan pelayanan publik secara terus-menerus dan berkelanjutan.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari :
1.1 Latar Belakang
1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Tren Wilayah
1.3 Kondisi Ekonomi Daerah
1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten
1.5 Isu Strategis

Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, bahwa pelaporan capaian kinerja instansi pemerintah yang disampaikan secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam *Dokumen Penetapan Kinerja*. Adapun pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dihasilkan dari setiap instansi pemerintah.

Sehingga laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Memedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja, Pemerintah Kabupaten Klaten menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Pembangunan Menyeluruh dan Tren Wilayah

1.2.1 Kondisi Geografi dan Demografi

a. Letak Geografis

Kabupaten Klaten dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Klaten terletak di jalur yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang dikenal sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW). Dari sisi

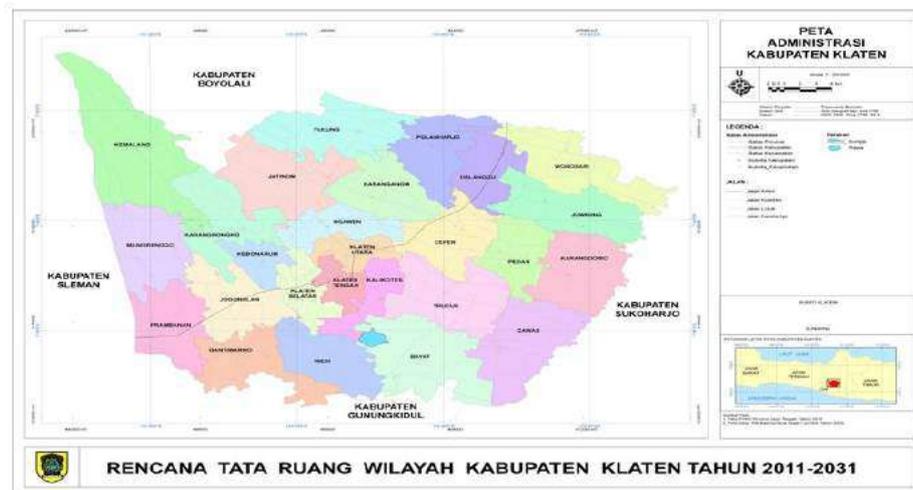
bentangan garis katulistiwa, Kabupaten Klaten terletak antara 7°32'19" Lintang Selatan sampai 7°48'33" Lintang Selatan dan antara 110°26'14" Bujur Timur sampai 110°47'51" Bujur Timur.

b. Tata Letak dan Wilayah Administrasi Administrasi

Kabupaten Klaten mempunyai luas wilayah 65.556 ha (655,56 km²) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya 3.254.412 ha. Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utaraberbatasan dengan Kabupaten Boyolali,
2. Sebelah Timurberbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY), dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY).

Gambaran Peta Wilayah Kabupaten Klaten berdasar Kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar1.1



Gambar1.1 Peta Administrasi Kabupaten Klaten Menurut Kecamatan

Adapun pembagian wilayah ada 26 kecamatan, 391 desa, 10 kelurahan, 3.689RW dan 9.592RT.

c. Penggunaan Lahan

Dari sisi penggunaan lahan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir mulai tahun 2014-2018 terjadi perubahan pola penggunaan lahan sawah irigasi. Penggunaan lahan sawah dari 33.314 Ha pada

tahun 2014, menjadi 33.220 Ha pada tahun 2015, menjadi 33.220 Ha pada tahun 2016, pada tahun 2017 menjadi 33.111 Ha, dan pada tahun 2018 menjadi 33.066 Ha.

Adapun perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian pada tahun 2017 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 55,2309 Ha, dengan perincian peruntukan: perumahan 40,8997 Ha, dan industri 13,6631 Ha. Sedangkan tahun 2018 seluas 45,391 Ha, dengan perincian peruntukan: perumahan 33,0577 Ha, industri 8,9094 Ha, perusahaan seluas 0,113 Ha, dan jasa seluas 3,3109 Ha.

Besaran luas lahan dan persentase lahan sawah yang beririgasi di Kabupaten Klaten menunjukkan bahwa tanah pertanian di Kabupaten Klaten masih sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa selama ini Kabupaten Klaten mendapat sebutan sebagai penyangga pangan di Provinsi Jawa Tengah. Pengembangan Kabupaten Klaten sebagai kawasan agropolitan, perlu adanya pengendalian dan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai produk unggulan yang disesuaikan dengan tata ruang wilayah.

d. Kondisi Demografi

Pada tahun 2017 sebanyak 1.308.712 jiwa, dan menjadi 1.314.781 jiwa pada tahun 2018. Berdasarkan jumlah penduduk yang tervalidasi, mengakibatkan pergeseran Rasio Beban Tanggungan (RBT) sebagaimana Tabel 1.1..

Tabel 1.1.

Rasio Beban Tanggungan (RBT)
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

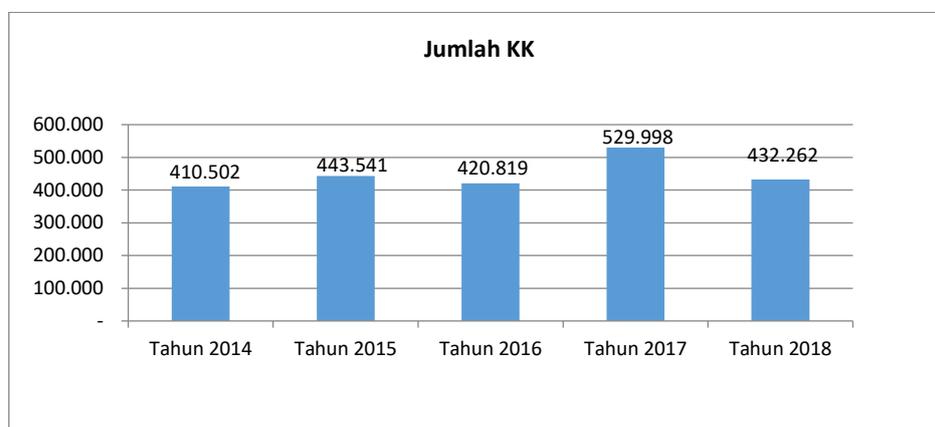
No	Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Jumlah Penduduk	Persentase RBT
		0-14	15-64	65+		
1	2014	284.632	1.016.916	167.705	1.469.253	44,48%
2	2015	288.064	1.023.245	168.962	1.480.271	44,66%
3	2016	288.047	1.028.714	169.665	1.486.426	44,49%
4	2017	275.208	907.665	125.839	1.308.712	44,18%
5	2018*)	251.025	916.620	147.136	1.314.781	43,44%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten, 2018

*) Data sementara, (diolah)

Disamping RBT sebagaimana tersebut di atas, jumlah KK yang semula sejumlah 529.998 KK pada tahun 2017 menjadi 432.262 KK

pada Tahun 2018 (atau berkurang sebanyak 97.736 KK). Hal ini disebabkan adanya penertiban administrasi kependudukan (setiap penduduk yang sudah menikah wajib memiliki KK tersendiri). Gambaran perkembangan jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 1.1.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten, 2018
Grafik 1.1. Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga (KK)
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

1.2.2 Indeks Pembangunan Manusia

Berbagai program pembangunan khususnya dalam pembangunan manusia yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten selama ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari 3 (tiga) komponen esensial untuk kehidupan manusia, yaitu: (i) Usia hidup panjang dan sehat diukur dengan Angka harapan Hidup, (ii) Pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan Rata-rata lama sekolah dan Angka harapan lama sekolah (iii) Standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran Riel Per kapita. Adapun Hasil penghitungan IPM Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Indikator IPM	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Hidup (tahun)	76,54	76,55			
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,92	8,16	8,22	8,23	
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,74	12,84	12,85	12,97	
Pengeluaran Riel Per Kapita (dalam Ribuan Rp.)	10.965	11.178			
IPM	73,19	73,81	76,59	76,62	

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Klaten, 2019.



Gambaran Ideal Daur Siklus IPM

1.2.3 Kemiskinan

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Klaten dapat disajikan dengan 2 (dua) pendekatan pendataan, yaitu: 1. Persentase penduduk miskin, dan 2. Jumlah rumah tangga miskin yang masing-masing dihitung dengan kriteria yang berbeda.

a. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin dihitung berdasarkan pada hasil survey Susenas, dimana angka yang diperoleh adalah angka makro. Adapun penentuan penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung berdasarkan pemenuhan kebutuhan pangan maupun non pangan. Garis kemiskinan setara dengan 2.100 kkal per kapita. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten selama tahun 2014-2018 cenderung mengalami penurunan walaupun penurunannya relatif

lambat. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3.

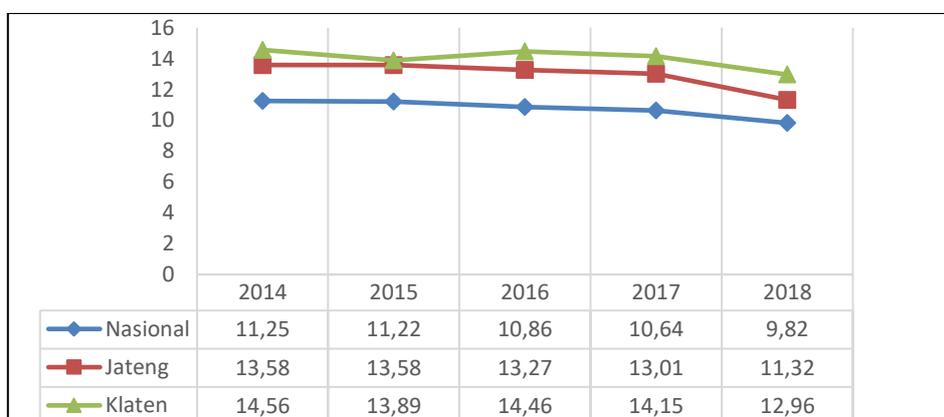
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Penduduk Disdukcapil (Jiwa)	Jumlah Penduduk BPS (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	1.469.253	1.154.028	168.180	14,56
2015	1.480.271	1.158.295	172.300	14,89
2016	1.486.426	1.163.218	168.010	14,46
2017	1.308.712	1.166.100	164.990	14,15
2018	1.314.781	1.171.411	151.700	12,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2019

Pada tahun 2018 angka persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 1,19 % yaitu dari tahun 2017 sebesar 14,15 % turun menjadi 12,96 %.hal ini dikarenakan percepatan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dari pemerintah turun tepat waktu, seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Dana Desa, pengendalian inflasi dan lain-lain.

Perkembangan relevansi persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 1.2.



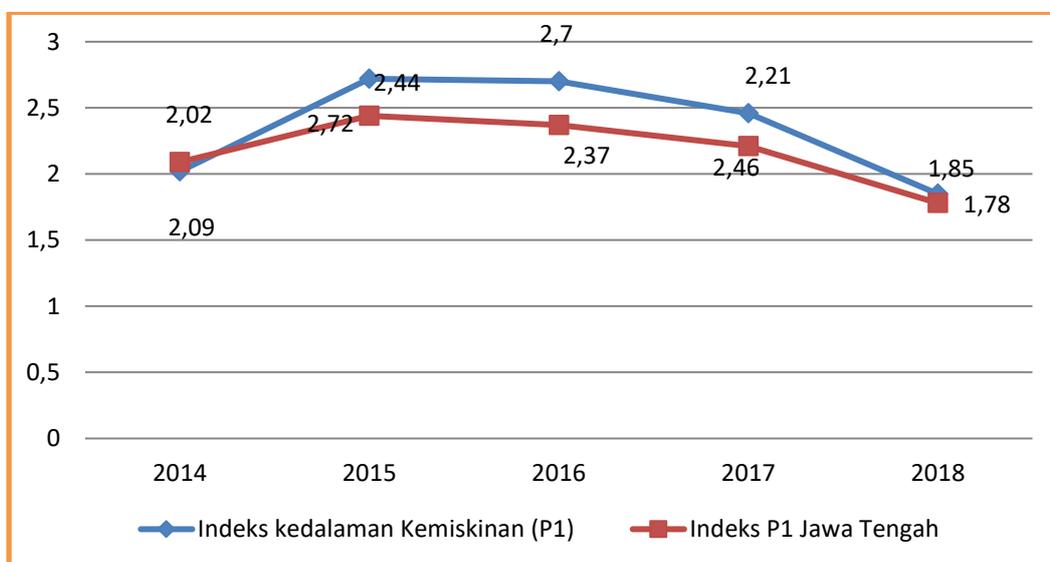
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2019

Grafik 1.2. Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2018

Penurunan angka kemiskinan terjadi baik di Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, hal ini dikarenakan keberhasilan program penganggulangan kemiskinan lintas sektor. Namun angka kemiskinan Kabupaten Klaten masih di atas angka kemiskinan provinsi dan nasional, hal ini disebabkan karena jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten masih terlalu banyak berdasarkan data PBDT Tahun 2018.

b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Data Kemiskinan Makro

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah dapat disajikan pada Grafik 1.3.



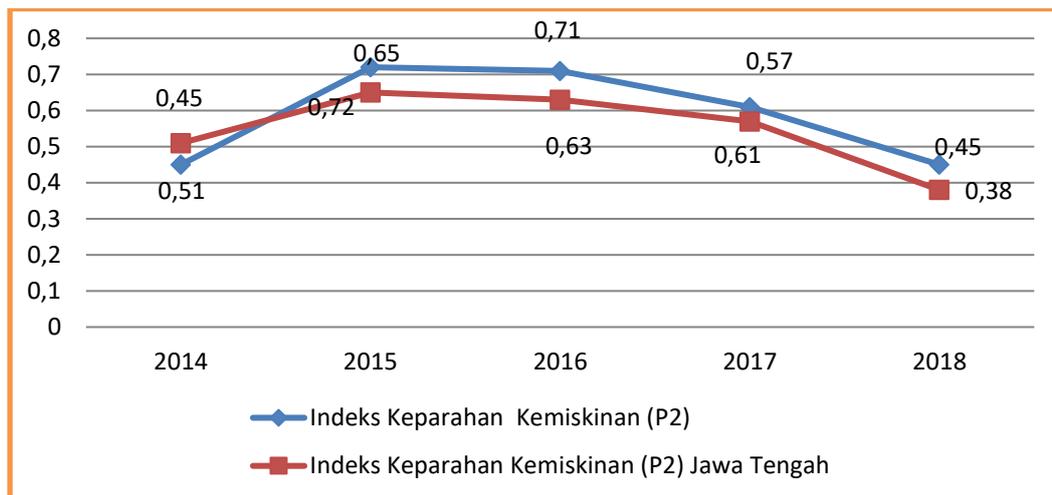
Grafik 1.3. Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) Kab. Klaten Terhadap Provinsi Jawa Tengah 2013-2017

Pada Grafik 1.3. ditunjukkan Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten pada tahun 2017 sebesar 2,46 masih di atas posisi Provinsi Jawa Tengah (2,21).

a. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Data Kemiskinan Makro

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran untuk mengetahui penyebaran ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan relevansi Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 1.5.



Grafik 1.4. Perkembangan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan(P2) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014-2018

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 terhadap perkembangan realisasi Provinsi Jawa Tengah, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten pada tahun 2017 (0,61) masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (0,57).



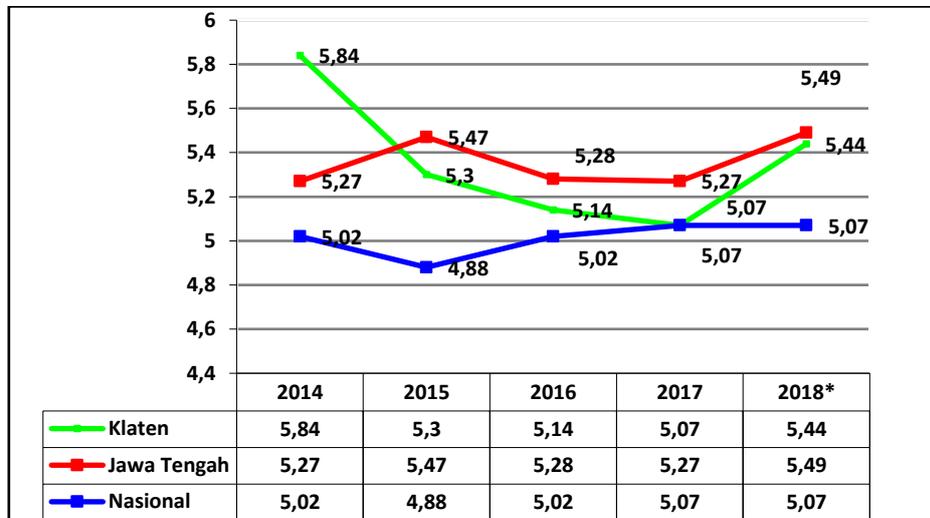
Gambaran Upaya yang Dilakukan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Klaten

1.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 menunjukkan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sektor UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa. Tahun 2014 sebesar 5,84%, Tahun 2015 sebesar 5,30%, Tahun 2016 sebesar 5,14%, Tahun 2017 sebesar 5,07%, dan pada tahun 2018 tumbuh sebesar

5,44%, hal ini sebagai dampak adanya pelaksanaan program pembangunan yang sinergis antar sektor.

Perbandingan pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2014-2018, dapat dilihat pada Grafik 1.5.



Sumber : BPS Kab. Klaten, 2019

*Proyeksi Sementara (Bappeda, 2019)

Grafik 1.5. Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten atas Dasar Harga Konstan 2010 selama Tahun 2014-2018 tumbuh secara positif. Gambaran selengkapnya Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010, di Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4.

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 (dalam Rp. Juta)

No	Lapangan Usaha	2014		2015		2016		2017		2018*	
		Nilai (juta Rp.)	Pertumbuhan (%)								
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.606.035,81	0,87	2.732.275,47	4,84	2.814.072,17	2,99	2.845.097,06	1.10	2.883.211,50	1.34
2	Pertambangan dan Penggalian	597.551,15	7,19	617.439,64	3,33	635.253,28	2,89	661.866,20	4.19	690.599,20	4.34
3	Industri Pengolahan	7.093.268,56	9,02	7.540.801,78	6,31	8.001.139,74	6,10	8.484.614,05	6.04	9.032.267,30	6.45
4	Pengadaan Listrik dan gas	38.526,20	3,28	39.160,62	1,65	41.588,12	6,20	44.249,82	6.40	47.202,20	6.67
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11.527,87	4,21	11.793,17	2,30	12.047,34	2,16	12.726,81	5.64	13.478,24	5.90
6	Konstruksi	1.294.690,29	3,17	1.356.317,55	4,76	1.435.985,49	5,87	1.528.175,76	6.42	1.629.914,60	6.66
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.094.285,55	2,35	4.209.074,39	2,80	4.358.461,18	3,55	4.519.078,43	3.69	4.699.213,20	3.99
8	Transportasi dan Pergudangan	515.457,41	9,82	544.592,24	5,65	566.772,32	4,07	597.101,45	5.35	631.381,60	5.74
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	792.087,87	4,89	832.820,90	5,14	883.280,17	6,06	944.307,06	6.91	1.013.542,00	7.33
10	Informasi dan Komunikasi	794.978,71	6,12	844.708,79	6,26	908.151,37	7,51	1.003.507,26	10.5	1.113.258,00	10,9
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	718.614,58	6,37	767.642,41	6,82	823.297,85	7,25	589.687,64	4.42	898.137,00	4.47
12	Real Estate	316.062,61	8,79	339.893,73	7,54	360.869,45	6,17	382.124,67	5.89	405.455,00	6.11
13	Jasa Perusahaan	65.626,24	8,41	70.961,66	8,13	77.484,45	9,19	83.334,52	7.55	89.961,60	7.95
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	546.822,57	0,61	574.874,57	5,13	591.863,52	2,96	610.862,34	3.21	631.158,40	3.32
15	Jasa Pendidikan	1.333.544,38	11,69	1.438.627,68	7,88	1.519.264,74	5,61	1.598.874,21	5.24	1.688.534,00	5.61
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	224.011,39	11,52	241.260,27	7,70	260.076,42	7,80	280.778,51	7.96	303.682,20	8.16
17	Jasa Lainnya	381.431,17	8,57	396.731,26	4,01	428.323,40	7,96	463.917,08	8.32	504.325,40	8.71
Produk Domestik Regional Bruto		21.424.522,36	5,84	22.558.976,15	5,30	23.717.931,02	5,14	24.920.302,87	5,07	26.275.321,44	5,44

Sumber : BPS Kabupaten Klaten 2018
*Proyeksi oleh Bappeda, 2019

Berdasarkan Tabel 1.4. dapat diketahui bahwa PDRB atas dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dari sebesar Rp.21.424.522,36 juta pada tahun 2014, meningkat menjadi sebesar Rp.26.275.321,44 juta pada tahun 2018 (atau naik 18,46%).

Jika dilihat Atas Dasar Harga Konstan sumbangan sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha terjadi pertumbuhan yang fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan namun juga ada yang menurun. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2018 tumbuh paling rendah diantara sektor lainnya, hal ini disebabkan perubahan iklim, adanya serangan hama dan lambatnya peningkatan produksi maupun produktifitas yang berakibat lambatnya nilai tambah sektor pertanian.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor meskipun tumbuh melambat, namun apabila dilihat dari nilai investasi mempunyai peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengatasi pengangguran.

Sektor lain yang protektif, dan tumbuh adalah sektor industri pengolahan. Sektor ini tumbuh tidak saja ditunjukkan berkembangnya usaha kecil mikro dan industri olahan, tetapi juga ditunjang menguatnya daya beli masyarakat yang menopang tumbuhnya perekonomian daerah.

Sementara itu, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010, pada Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten
Tahun 2014-2018 (dlm Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2014		2015		2016		2017		2018*	
		Nilai (juta Rp.)	(%)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,284,129.30	6.1	3,622,347.95	10.3	3,807,648.99	5.12	3,888,677.97	7.82	4,206,252.00	8.17
2	Pertambangan dan Penggalian	809,207.55	22.2	955,364.63	18.06	1,013,913.84	6.13	1,090,844.57	14.12	1,251,575.40	14.73
3	Industri Pengolahan	9,116,653.82	18.5	10,178,503.39	11.65	11,342,482.65	11.44	12,412,507.52	13.02	14,080,982.00	13.44
4	Pengadaan Listrik dan gas	36,912.08	6.46	39,661.13	7.45	45,832.98	15.56	52,851.96	8.04	57,168.80	8.17
5	Pengadaan Air, Pengolahan sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12,097.70	6.17	12,698.33	4.96	13,246.78	4.32	14,143.63	5.17	14,934.58	5.59
6	Konstruksi	1,604,879.56	13.2	1,780,130.61	10.92	1,914,709.83	7.56	2,090,001.40	10.03	2,307,153.80	10.39
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,609,167.50	5.65	4,947,444.05	7.34	5,290,031.30	6.92	5,686,966.56	6.33	6,048,164.80	6.35
8	Transportasi dan Pergudangan	557,513.39	15.39	614,745.60	10.27	645,983.06	5.03	730,496.14	10.66	810,468.50	10.95
9	Penyediaan Akomodasi dan	878,161.00	9.33	974,845.99	11.01	1,091,004.92	11.92	1,190,467.24	8.91	1,298,448.50	9.07

No	Lapangan Usaha	2014		2015		2016		2017		2018*	
		Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)	Nilai (juta Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Makan Minum										
10	Informasi dan Komunikasi	836,098.10	5.09	880,528.28	5.31	948,513.65	7.72	1,094,538.75	5.97	1,163,021.70	6.26
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	888,874.29	10.97	985,803.41	10.9	1,084,247.12	9.99	1,180,028.20	10.62	1,312,773.50	11.25
12	Real Estate	343,172.57	14.82	381,078.74	11.05	409,138.03	7.36	444,110.49	10.41	493,620.60	11.15
13	Jasa Perusahaan	79,657.41	12.11	90,459.78	13.56	102,385.38	13.18	114,288.85	16.27	133,065.00	16.43
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	668,437.00	6.77	730,951.96	9.35	790,819.46	8.19	842,976.28	7.50	910,240.00	7.98
15	Jasa Pendidikan	1,805,978.48	16.62	1,984,205.50	9.87	2,159,132.68	8.82	2,366,343.26	13.34	2,685,456.10	13.49
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	303,146.41	15.57	339,329.96	11.94	371,819.69	9.57	411,170.96	14.07	472,641.00	14.95
17	Jasa Lainnya	436,804.15	15.64	470,679.24	7.76	527,780.71	12.13	580,442.53	12.35	656,570.40	13.12
	Produk Domestik Regional Bruto	26,270,890.31	12.53	28,988,778.55	10.35	31,558,691.06	8.87	34,190,856.31	10.27	37,902,536.68	10.68

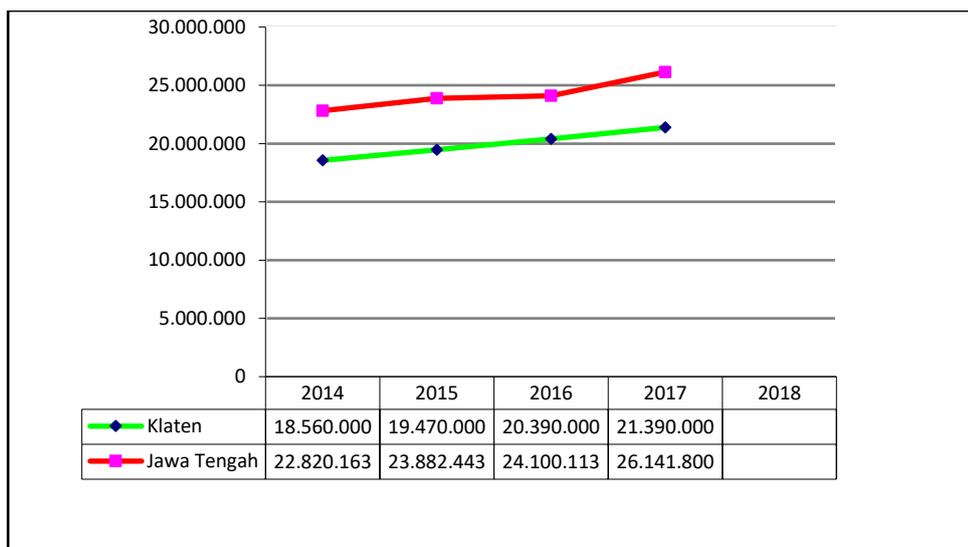
Sumber: BPS Kabupaten Klaten 2018

*Proyeksi oleh Bappeda, 2019

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018 sebagaimana Tabel 2.4 di atas tumbuh secara fluktuatif. Pada Tahun 2018 sebesar Rp.37.902.536,68 juta dari Tahun 2017 sebesar Rp.34.190.856,31 juta.

Sedangkan jika dilihat Atas Dasar Harga Berlaku sumbangan sektor PDRB berdasarkan lapangan usaha terjadi pertumbuhan yang fluktuatif, ada yang mengalami kenaikan namun juga ada yang menurun. Pada Tahun 2018, kontribusi terbesar atas dasar harga berlaku masih disumbang oleh sector industry pengolahan sebesar 37,15% atau Rp.14.080.982 juta.

Sedangkan pertumbuhan PDRD perKapita Tahun 2018 mengalami kenaikan seiring dengan pertumbuhan PDRD Atas Dasar Harga Berlaku. Gambaran pertumbuhan PDRD per Kapita sebagaimana Grafik 1.6.

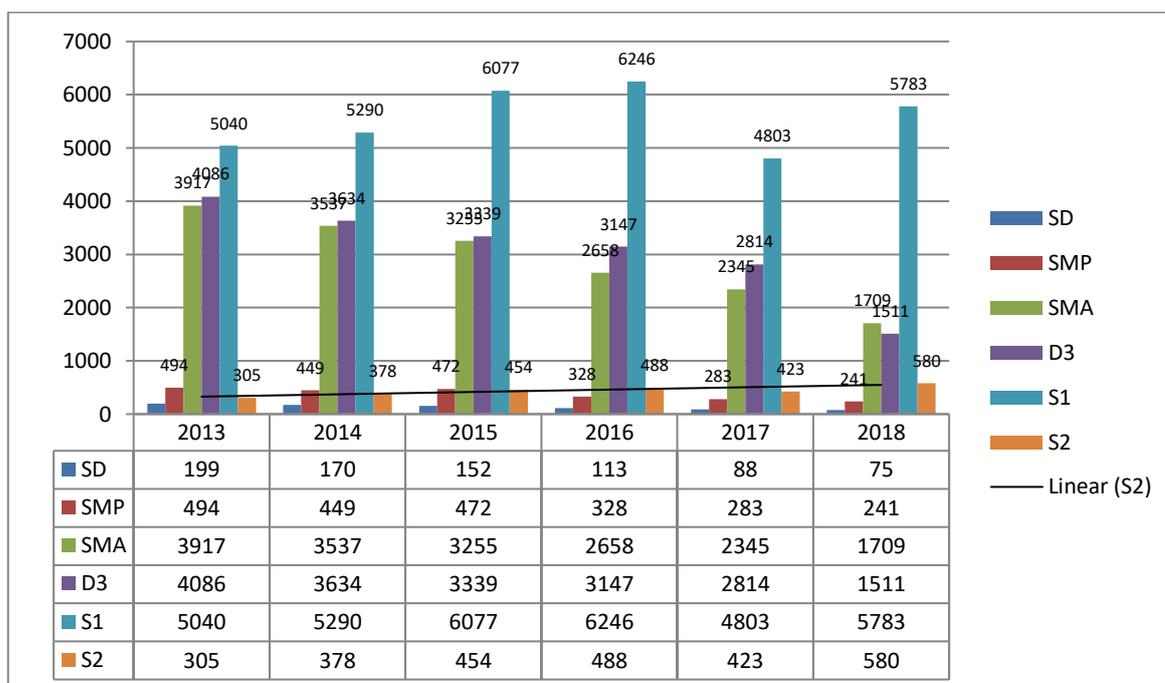


Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2019

Grafik 1.6. Perkembangan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

1.4 Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten

Kapabilitas SDM Pemerintah Kabupaten Klaten berdasarkan jumlah ASN pada Tahun 2018 sebanyak 9.899 orang. Gambaran singkat profil jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan, dan dapat disajikan dalam Grafik 1.7.



Sumber : BKPPD Kabupaten Klaten, 2019.

Grafik 1.7 Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2013-2018

Berdasarkan Grafik 1.7. sebagaimana tersebut di atas, Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yaitu aparatur pegawai yang profesional baik dalam hal kompetensi, sikap dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tugas dan peranannya masing-masing. Berikut Tabel ASN yang telah mengikuti diklat struktural di Kabupaten Klaten. Sedangkan pejabat Struktural yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Kabupaten Klaten 2014–2018 disajikan pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6.

Pejabat Struktural Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

NO	Jabatan (Eselon)	Jenis Diklat Struktural	Sudah Nengikuti Diklat Struktural														
			TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
			LU LU S	JML PEJ ABA T	%	LU LU S	JML PEJ ABA T	%	LU LU S	JML PEJ ABA T	%	LU LU S	JML PEJ ABA T	%	LU LU S	JML PEJ ABA T	%
1	JPT (Eselon II)	Diklatpim Tingkat II	0	23	0	0	24	0	5	21	23,8	5	21	23,81	5	27	18,52
2	Administ rator (Eselon III)	Diklatpim Tingkat III	2	145	1,38	2	148	1,35	3	143	2,1	8	138	5,80	16	152	10,53
3	Pengawa s (Eselon IV)	Diklatpim Tingkat IV	3	541	0,55	2	602	0,33	2	520	0,38	16	495	3,23	48	452	10,62

Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 1.6. sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pejabat yang sudah mengikuti Diklat Kepemimpinan II sebanyak 18.52%, diklat kepemimpinan III 10.53 % dan diklat kepemimpinan IV 10.62 % yang menandakan masih dibutuhkan diklat kepemimpinan baik pejabat eselon II, III dan IV. Sedangkan dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur terdapat data ASN yang telah mengikuti Diklat, Bintek dan Seminar tahun 2014–2018 disajikan pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7.

Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat, Bintek dan Seminar
Tahun 2014–2018

NO	PERMOHONAN	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Diklat Teknis sesuai Tupoksi	23	41	56	211	450
2.	Diklat Teknis Fungsional	28	27	36	47	312
3.	Bimbingan Teknis	61	89	80	42	58
4.	Seminar dan sejenisnya	14	24	-	-	-
JUMLAH		126	181	172	300	820

Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 1.7. sebagaimana tersebut di atas, kondisi jumlah pegawai Kabupaten Klaten yang berjumlah 9.899 ASN dibandingkan dengan yang telah mengikuti diklat, bintek dan seminar hanya 8.28 %. Hal ini menandakan masih diperlukan peningkatan sumber daya aparatur agar kinerja pegawai meningkat.

1.5 Isu Strategis

Isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Klaten, diantaranya:

1. Pendidikan Untuk Semua dan Peningkatan Moralitas

Isu belum optimalnya penanaman nilai-nilai moralitas, budi pekerti dan integritas diibaratkan bahwa pendidikan memiliki dua mata pisau, di satu sisi berorientasi pada kecerdasan dan iptek guna kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan jasmaniah, di sisi lain berorientasi pada kecerdasan emosional dan spiritual guna kedamaian hidup, solidaritas dan kepedulian sosial.

Penunjang sisi yang pertama adalah adanya kesempatan dalam memperoleh pendidikan, sarana dan prasarana yang memadai, serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Kesempatan yang sama tersebut berlaku baik laki-laki-perempuan, tua-muda, kaya maupun miskin, yang artinya bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Menuju pendidikan Wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Klaten, Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan gedung dan prasarana lainnya, merupakan contoh riil perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Agar pendidikan bisa bermanfaat, kurikulum pendidikan juga harus mempertimbangkan kebutuhan dunia usaha dan spesifikasi potensi setiap pelaku/siswa.

Penunjang sisi yang kedua adalah pembentukan karakter manusia yang berbudi, agar mampu memilih yang baik, menghindari/mencegah perilaku yang salah. Sehingga perlunya pendidikan untuk semua, dan peningkatan moralitas menjadi upaya sinergis untuk menciptakan Kabupaten yang maju dan berdaya saing.

2. Pelayanan Kesehatan

Percepatan SDG's dan pencapaian target indikator kinerja SPM Kesehatan belum tercapai. Angka kematian bayi dan balita, status Gizi masyarakat, endemi Demam Berdarah, Flu Burung dan Chikungunya, angka kesakitan dan kematian diabetes militus, kardiovaskuler dan keganasan (kanker), kebiasaan merokok serta pola hidup tidak sehat lainnya menjadi sebagian dari masalah yang harus ditangani.

Kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi, jaminan pelayanan kesehatan yang memuaskan bagi semua warga negara. Subsidi silang pun harus disadari oleh semua pengguna layanan kesehatan bahwa tanggung jawab pembangunan tidak hanya pada pemerintah, tetapi seluruh komponen masyarakat/swasta sesuai dengan kemampuannya.

3. Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Isu reformasi birokrasi selama ini belum menyentuh akar permasalahan peningkatan pelayanan publik, dalam hal memperbaiki tata pemerintahan yang mencakup seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban) dengan pengertian:

- Dalam sistem perencanaan, kebijakan harus sinergis sejalan dengan kebutuhan dan kemampuan, terukur, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Dalam hal kelembagaan, organisasi pemerintah daerah dibentuk secara ramping namun mampu mencakup keseluruhan urusan/kepentingan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, jelas, tidak tumpang tindih dan memungkinkan kemudahan akses pelayanan terhadap publik.
- Penanganan berbagai permasalahan pemerintahan dan pembangunan (Penegakan Peraturan Daerah, dan Pencegahan Korupsi) yang sangat kompleks membutuhkan penempatan aparatur yang sesuai baik secara kualitas kompetensi maupun kuantitasnya. Pembinaan terhadap aparatur mesti terus dilakukan agar mampu menyikapi dinamika yang terjadi, responsif dengan dedikasi dan integritas yang tinggi untuk semata-mata

kepentingan umum. Selain itu, pembangunan juga membutuhkan aparatur dengan daya inisiasi dan inovasi yang baik untuk dapat mengejar ketertinggalan dan mengatasi keterpurukan atas kemiskinan dan instabilitas yang terjadi.

- Kelemahan SKPD dalam pelaporan dan pertanggungjawaban biasanya terletak dalam kemampuan penyediaan data, analisa dan model laporan yang tidak simpel. Kesadaran akan pentingnya data yang lengkap dan akurat hingga kearsipan sebagai dokumen pembuktian harus ditingkatkan.

4. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Isu keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk membiayai pembangunan daerah selalu terkait dengan pelaksanaan Otonomi Daerah bahwa Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

Sekalipun langkah dan kebijakan peningkatan pendapatan daerah telah diupayakan melalui intensifikasi pemungutan pajak/retribusi, penggalan potensi pendapatan dan perwujudan realisasi investasi, dan efisiensi dan efektivitas belanja daerah tetap saja keterbatasan anggaran menjadi masalah klasik. Anggaran berbasis kinerja, dan anggaran berbasis beban kerja belum bisa menjawab kebutuhan pembangunan, manakala penapisan permasalahan belum terurai terlebih dahulu.

5. Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan terjadi karena rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Klaten yang masih rendah di banding dengan rerata Jawa Tengah, sementara tingkat inflasi yang masih relatif tinggi sangat memungkinkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat, sehingga menimbulkan beban berat bagi masyarakat miskin. Langkah preventif dalam bentuk pemberdayaan dan langkah kuratif dalam bentuk jaminan sosial atas kebutuhan dasar mesti dilakukan. Sisi lain, masih terjadinya kesenjangan antar wilayah kecamatan yang memerlukan perhatian semua pihak.

Tingkat pengangguran terbuka yang terus meningkat selain disebabkan oleh dampak berkepanjangan krisis ekonomi dan bencana alam, juga disebabkan oleh rendahnya kualitas angkatan kerja yang tidak mampu bersaing dan tidak mampu menciptakan lapangan kerja mandiri. Disamping itu, lapangan kerja yang akan terus bertahan adalah terciptanyapangsa pasar yang besar dan memiliki daya saing produk, maka penerapan iptek dalam produksi dan bisnis serta peningkatan hubungan antara produsen lokal dengan pasar yang luas harus menjadi perhatian.

6. Ancaman Kerusakan Lingkungan, Permukiman Tak Sehat, dan Bencana Alam

Menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan hidup di kawasan penambangan bahan galian golongan C, dan menurunnya daya dukung lingkungan, kelestarian fungsi adalah sebagai akibat kurangnya pengendalian para pemangku-kepentingan dalam pemanfaatan, dan penataan struktur ruang. Kesalahan dalam tata guna lahan, bangunan, rumah tidak layak huni, lingkungan permukiman kumuh utamanya pada kawasan padat, penghijauan dan resapan air ke tanah serta penertiban perijinan perlu makin diperhatikan.

Dampak dari kesalahan tersebut akan meningkatnya potensi kerusakan lingkungan dan bencana non alam, bencana alam dan bencana sosial, menuntut kesiap-siagaan penanganan bencana dan dukungan sarana-prasarana makin dibutuhkan. Terutama perlunya pengelolaan Sumber daya alam dan lingkungan yang selaras dengan daya dukung dan daya tampung, mendesak hal yang mendesak untuk dilakukan.

7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan

Isu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang merebak akhir-akhir ini menyebabkan perlunya perlindungan anak dan perempuan, apalagi untuk mewujudkan Kabupaten Klaten LAYAK ANAK menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut dilatar-belakangi masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik, masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak, lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, serta sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai.

8. Tuntutan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Isu tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik selama ini masih adanya masyarakat belum sejahtera, padahal azas dasar tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik.

Sehingga berbagai kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dan harus dilaksanakan dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut. Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain-lain. Kemudahan

perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

9. Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan

Isu lahan pangan berkelanjutan mencuat, karena penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berkurang seiring dengan penambahan jumlah penduduk, aktifitas penduduk dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan dari tanah pertanian berubah ke non pertanian, mengingat Kabupaten Klaten dinyatakan sebagai daerah penyangga pangan, maka perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan kebutuhan untuk mempertahankan posisi sawah lestari menjadi mendesak. Adapun sawah lestari ditetapkan seluas 32.451 Ha yang tersebar di wilayah Kabupaten Klaten.

10. Penanganan Infrastruktur

Meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah, menyebabkan semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik. Dalam hal ini, tidak terbatas pada infrastruktur fisik namun juga terintegrasi dengan infrastruktur non fisik dan teknologi informasi, sehingga ke depan partisipasi, transparansi dan ketepatan manfaat akan menjadi lebih baik. Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu, integral dan lintas sektor yang sinergis dengan rencana tata ruang.

Belum optimalnya kondisi infrastruktur di Kabupaten Klaten dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta wilayah, berimplikasi pada beban masyarakat dalam penyediaan produksi, dan mobilisasi sumberdaya. Selain itu, pengembangan dan pembenahan sarana transportasi publik juga menjadi hal penting guna mengurangi beban arus distribusi dan akan berefek domino pada koneksitas antar wilayah yang semakin kuat.

Pembangunan infrastruktur sumberdaya air diarahkan untuk mewujudkan air sebagai *collective goods*. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk kepentingan produksi dan konsumsi secara efektif dilakukan melalui perlindungan terhadap kawasan resapan air di daerah hulu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber-sumber air tersebut. Selain itu, pembangunan jaringan irigasi yang menunjang peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi hal penting untuk tetap dilakukan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Klaten.

Pengembangan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi hal penting dan menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur secara utuh dan berkelanjutan. Namun demikian, pertumbuhan dan kegiatan sosial ekonomi juga perlu mempertimbangkan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat menjamin keutuhan lingkungan hidup guna menjaga keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan akan datang. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan hidup melalui upaya rehabilitasi dan pemulihan sumber daya alam.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan bagian penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan penyelarasan antara visi, misi dan arah pembangunan daerah. Penyajian analisis dalam bagian permasalahan pembangunan yang mengawali bagian analisis isu-isu strategis, diharapkan akan dapat menjelaskan isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2021.

BAB II PERENCANAAN KINERJA, berisi :
2.1 Rencana Strategis
2.2 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2018
2.3 Program Pendukung Pencapaian Sasaran

2.1.1 Visi dan Misi

Visi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 disebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan. Sehingga rumusan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah: *"Indonesia yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur"*.

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, dengan Visi: *"Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari"*.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 adalah: “*Terwujudnya Masyarakat Klaten Sejahtera Yang Berketuhanan, Cerdas, Mandiri dan Berbudaya*”.

Belajar dari sejarah, dan berangkat dari potensi dan peluang yang dimiliki, serta untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah:

MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING

Dasar Filosofi Misi RPJMD Kab. Klaten Tahun 2016–2021, yakni:

- 
- Pertama* : **Redi – tinamping**, artinya seorang pemimpin harus bisa aju-ajer dengan masyarakat.
 - Kedua* : **Jiwan – danarta**, artinya seorang pemimpin harus mampu membaca tanda-tanda zaman. Rumusan RPJM yang kita susun, tak lebih sebagai aktualisasi diri membaca tanda-tanda zaman.
 - Ketiga* : **Lir – ginelar**, artinya dalam mengambil keputusan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Itulah mengapa perlunya Musrenbangda RPJM.
 - Keempat* : **Pitraya – inyika**, artinya jiwa pengabdian seorang pemimpin harus dilandasi adanya semangat untuk melayani. Itulah maknanya semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten diwajibkan fokus pada urusan pelayanan dasar.
 - Kelima* : **Andaya – wilang**, artinya seorang pemimpin jangan mengumbar janji, dan memelihara rasa “ewuh pakewuh” tetapih fokus pada tujuan semula, dalam bahasa Permendagri: aspek kesejahteraan, pelayanan publik, dan daya saing daerah harus tetap sebagai arah kebijakan pembangunan daerah.
 - Keenam* : **Surya – sribhawanti**, artinya kehadiran negara harus menjadi pelindung peradapan.
 - Ketujuh* : **Rohartaya**, artinya selalu harus insaf dan tawakal.
 - Kedelapan* : **Traju – tresna**, artinya arif dan bijaksana

14

Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Maju, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik *kebutuhan lahiriah* yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun *kebutuhan batiniah* yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.

3. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.

4. **Berdaya saing**, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.

Misi

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Sedangkan Misi Pembangunan Daerah sebagai implementasi Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021 yang dirumuskan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;
- Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- Misi 3 : Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
- Misi 4 : Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;
- Misi 5 : Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
- Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
- Misi 7 : Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
- Misi 8 : Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sementara sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran memuat penjabaran visi dan misi yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan, serta memuat besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan. Sehingga adanya rumusan sasaran diharapkan dapat membantu dan memandu dalam mempermudah perumusan indikator kinerja.

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 memiliki tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut.

Misi 1

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berbudaya

Misi ini didukung dengan 6 (enam) tujuan, yaitu:

- Tujuan 1 : Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat
- Sasaran 1 : Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal.
- Tujuan 2 : Mewujudkan kualitas derajat kesehatan masyarakat
- Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian, angka kesakitan dan kecacatan.
- Sasaran 2 : Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitannya oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.
- Tujuan 3 : Menurunkan tingkat kemiskinan
- Sasaran 1 : Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM.
- Tujuan 4 : Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk
- Sasaran 1 : Menurunnya angka kelahiran (*Total Fertility Rate*).

Tujuan 5 : Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat, Berprestasi dan Berbudaya

Sasaran 1 : Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.

Sasaran 2 : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.

Tujuan 6 : Meningkatkan minat baca masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan

Misi 2

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi ini didukung dengan 4 (empat) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah.

Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Tujuan 2 : Meningkatnya pengelolaan dan penataan arsip daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola arsip SKPD

Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan administrasi pemerintahan desa.

Sasaran 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel.

Tujuan 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

- Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah.
- Sasaran 3 : Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM.
- Sasaran 4 : Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan.
- Sasaran 5 : Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel.
- Sasaran 6 : Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan.
- Sasaran 7 : Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian.
- Sasaran 8 : Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat.

Misi 3

Meningkatkan dan Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Lebih Produktif, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Lokal;

Misi ini didukung dengan 5 (lima) tujuan, yaitu:

- Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing untuk kesejahteraan Masyarakat.
 - Sasaran 1 : Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
- Tujuan 2 : Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa.
 - Sasaran 1 : Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan
- Tujuan 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat.
 - Sasaran 1 : Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata.

- Sasaran 2 : Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM.
- Sasaran 3 : Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah.
- Sasaran 4 : Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal.
- Tujuan 4 : Menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
 - Sasaran 1 : Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan.
 - Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan
- Tujuan 5 : Meningkatnya daya saing produk industri daerah.
 - Sasaran 1 : Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian.

Misi 4

Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

- Tujuan 1 : Meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat.
 - Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat.
 - Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan.
 - Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman

Misi 5

Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan dan Kelestarian Sumber Daya Alam yang Selaras dengan Tata Ruang Wilayah;

Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu:

- Tujuan 1 : Meningkatkan kelestarian sumber daya alam.
 - Sasaran 1 : Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang.
 - Sasaran 2 : Terjaganya kualitas lingkungan hidup.

Tujuan 2 : Mewujudkan pengurangan resiko bencana.

Sasaran 1 : Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana.

Misi 6

Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkepribadian;

Misi ini didukung dengan 3 (tiga) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai jati diri dan berwawasan kebangsaan.

Sasaran 1 : Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi.

Tujuan 2 : Meningkatkan pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan.

Sasaran 1 : Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya.

Tujuan 3 : Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sasaran 1 : Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Misi 7

Meningkatkan Kapasitas Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak;

Misi ini didukung dengan 1 (satu) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan kualitas pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak.

Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak.

Misi 8

Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Publik;

Misi ini didukung dengan 2 (dua) tujuan, yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas layanan masyarakat.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan perhubungan.

Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Sasaran 3 : Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas.

Tujuan 2 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi.

Sasaran 1 : Pengembangan ketransmigrasian.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, selanjutnya dirumuskan IKU (indikator kinerja utama) Kabupaten Klaten sebagai ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan, dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) dari berbagai program prioritas sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Perumusan IKU Kabupaten Klaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Namun dengan berlakunya peraturan Mendagri No 86 Tahun 2017, IKU menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD yaitu Bab VII. Oleh karena itu, IKU Kab. Klaten tercantum dalam Peraturan Daerah Kab. Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kab. Klaten 2016-2021. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun sasaran strategis Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1

**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
(1)	(2)	(3)	
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu
		2.2	Angka Kematian Bayi
		2.3	Angka kematian Balita
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
(1)	(2)	(3)	
3	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	3.1	Usia Harapan Hidup
4	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	4.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
		4.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS
		4.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
5	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	5.1	Angka Kelahira (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase raperda yang disahkan tepat waktu
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	13.1	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	14.1	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP
		15.2	Level Kapabilitas APIP
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan
		17.2	produk hukum dan penanganan perkara
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
(1)	(2)	(3)	
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah
		20.2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
		26.2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Prosentase inovasi yang diterapkan
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA)
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA)
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
		31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks kualitas air
		36.2	Indeks kualitas udara
		36.3	Indeks tutupan vegetasi (lahan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
(1)	(2)	(3)	
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks kapasitas bencana
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks demokrasi
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks ketertiban masyarakat
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	41.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks kepuasan layanan perhubungan
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survy kepuasan masyarakat
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks kepuasan layanan masyarakat
45	Pengembangan ketransmigrasian	45.1	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Klaten 2016-2021.

2.1.3 Pentahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan visi bupati terpilih pada periode Tahun 2016-2021 yakni **Mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing** dengan menetapkan 8 (delapan) butir misi sebagai penjabaran atas visi dalam rangka perwujudan *ultimate goal*. Maka agar *ultimate goal* ini jelas sarannya, dan dapat diimplementasikan perlu disusun pentahapan pembangunan daerah sebagai *milestone* (sasaran antara) dalam mewujudkan visi.

Gambaran tema/agenda pembangunan dari tahun 2017-2021 dapat disajikan dalam Diagram 2.1.

TEMA/AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2017-2020

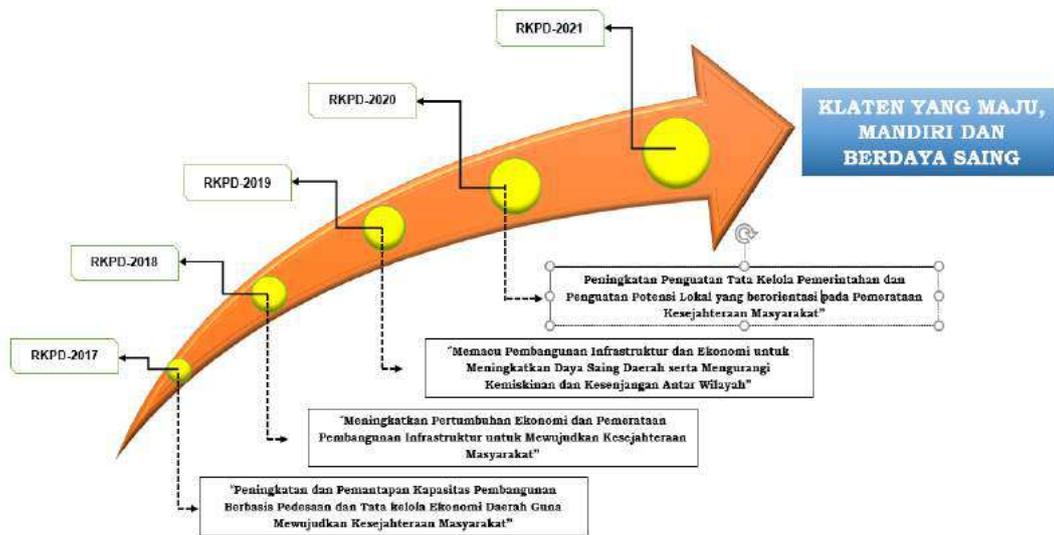
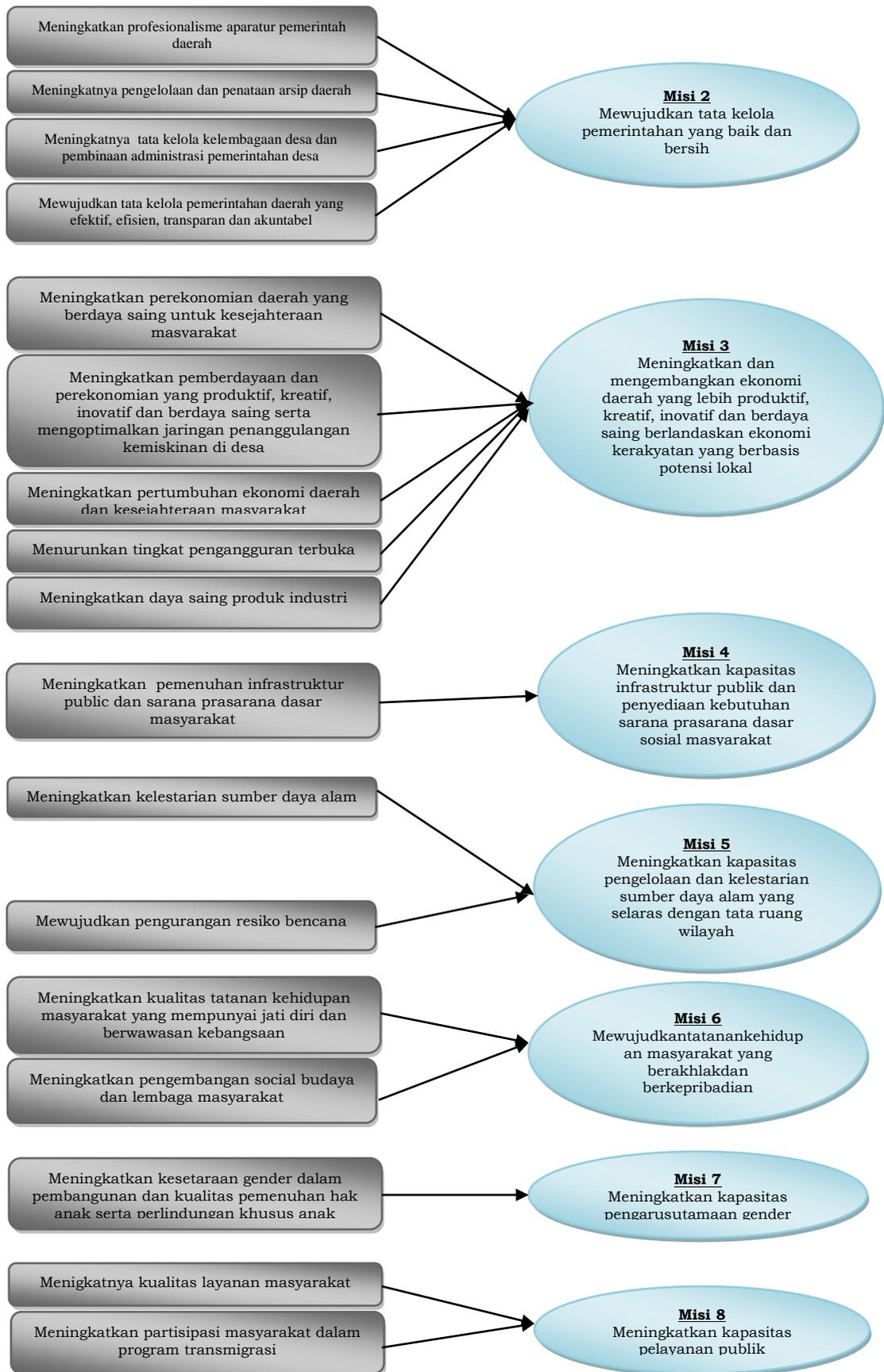


Diagram 2.1. Tema/Agenda Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Mendasarkan pada arah tema/agenda pembangunan tersebut, perlu dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan daerah yang disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran. Pemerintah Kabupaten Klaten untuk setiap tahunnya.

Diagran 2.2 Korelasi antara Tujuan dan Misi Pembangunan Daerah





2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Program Prioritas sebagaimana tersebut di atas, untuk memberi gambaran yang lebih sistematis dan terukur ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ditetapkan mengacu pada RPJMD, RKPD 2017, IKU dan APBD. Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2018 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	48,00
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	80,00
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu	Kasus	17
		2.2	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,13
		2.3	Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,67
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,73
3	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitatan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	3.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,62
4	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	4.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	83
		4.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	96
		4.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13,3
		4.4	Persentase penduduk miskin	%	14,12

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
5	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	5.1	Angka Kelahira (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR		2,16
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82,06
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WDP
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	85
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100
13	Meningkatnya tata kelola arsip OPD	13.1	Prosentase kenaikan OPD mengelola arsip secara baku	%	5
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	14.1	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	46
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP	Tingkat	2
		15.2	Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	64 (B)
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	2,9
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	85
		17.2	Indeks kabupaten peduli HAM	%	75
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	90
		20.2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	90
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	94
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	90
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,25
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan Kemiskinan	24.1	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek	%	35
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,94
		27.2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	9
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	72,73
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):		
			PMDN	%	417
		PMA	%	294	
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):		
PMDN	%		1,98		
PMA	%	2,45			
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,03
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja	%	69
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	87,60

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,86
		31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	5,50
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	29,42
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	45,87
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks	70,01
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	78,98
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks kualitas air	Indeks	30,68
		36.2	Indeks kualitas udara	Indeks	74,68
		36.3	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	Indeks	48,82
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks kapasitas bencana	Indeks	sedang
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks demokrasi	Indeks	75
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	49
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	95
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	41.1	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Indeks	60,16
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nidya
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	79,016
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan	%	79,52
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks kepuasan layanan masyarakat terhadap layanan administrasi	Indeks	80
45	Pengembangan ketransmigrasian	45.1	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	40,50

2.3 Program Pendukung Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya untuk mencapainya kemudian dijabarkan kedalam program prioritas untuk mendukung tercapainya pembangunan jangka menengah daerah. Adapun program prioritas untuk mendukung tercapainya sasaran, sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Program Pendukung Pencapaian Sasaran

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Pendukung
(1)	(2)	(3)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	6
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	11
3	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>).	0
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	1
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	4
6	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>).	3
7	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	2
8	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	3
9	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	1
10	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	2
11	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	1
12	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	1
13	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	4
14	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	2
15	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	2
16	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	3
17	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	9
18	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	2
19	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	1
20	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	1

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Pendukung
(1)	(2)	(3)
21	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	3
22	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	1
23	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	1
24	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	5
25	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	2
26	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	3
27	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	6
28	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	1
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	1
30	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	2
31	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	1
32	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	2
33	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	3
34	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	1
35	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	5
36	Terkendalnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	1
37	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	3
38	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	3
39	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	2
40	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	3
41	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	1
42	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	2
43	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	1
44	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	1
45	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	1
46	Pengembangan ketransmigrasian	2
Jumlah		116



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak.

Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi Pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan, dan mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu dasar rujukan yang diacu adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja. Juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terutama terkait dengan penentuan skala nilai peringkat kinerja sebagai bahan penilaian dari masing-masing sasaran strategis. Adapun skala nilai peringkat kinerja sebagaimana dimaksud, dapat disajikan pada Tabel 3.1.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, berisi :
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja
3.3 Akuntabilitas Anggaran
3.4 Efisiensi Sumber Daya

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diolah.

Tabel 3.2.

Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≤ 100	Baik	
2	$\geq 99,9$	Tidak Baik	

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, capaian indikator kinerja organisasi yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018 sebagaimana Tabel 3.3.

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	48,00	61,05	127,19
		1.2	Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	80,00	82,00	102,44
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu	Kasus	17	13	123,53
		2.2	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,13	10,7	94,37
		2.3	Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,67	1,9	86,23
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,73	0,56	123,29
3	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitian oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	3.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,62	76,77	100,20
4	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	4.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	83	70,66	85,13
		4.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	96	96	100
		4.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13,3	14,32	107,67
5	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	5.1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR		2,16	1,91	111,60
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10	12	120
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	5	100
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6	3,2	54
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10	14,3	143
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Persentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5	65,79	1.315,8
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	82,06	74	90,18
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah daerah	Opini	WDP	WDP	WDP
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	85	85	93,10

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	100	95
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	13.1	Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	11,72	234,4
14	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	14.1	Persentase penyelenggaraan Pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	46	48	104
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP	Tingkat	2	2	100
		15.2	Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3	2	66,67
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Angka	64 (B)	60,33 (B)	94,27
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	2,9	3,09	110,4
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	85	90	105
		17.2	Indeks kabupaten peduli HAM	%	75	234	175,5
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90	87,78	97,53
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	100	100
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah	%	94	94	100
		20.2	Persentase dokumentasi kegiatan Kepala Daerah	%	94	98	102,1
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah	%	94	95	101,06
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)	2,39	68,29
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	90	90	100
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,25	10,98	89,68
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Persentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek	%	35	35	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25	47,50	190
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,94	17,88	94,40
		26.2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	9	8,99	99,88
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Persentase inovasi yang diterapkan	%	72,73	60	82,56
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):				
			PMDN	%	417	131	31,41
			PMA	%	294	264	89,79
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):				
			PMDN	%	1,98	1078	54.444,44
PMA	%	2,45	424	17306,12			
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,03	0,87	84,47
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja	%	69	73,58	106,64
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	87,60	82,59	94,28
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,86	35,94	103,10
		31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	5,50	1,80	32,73
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	29,42	58,61	199,22
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	45,87	43,58	95,01
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks kualitas perumahan dan kawasan pemukiman	Indeks	41,06	34,08	83
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	78,98	78,98	100
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks kualitas air	Indeks	78,98	78,98	100
		36.2	Indeks kualitas udara	Indeks	30,68	18,28	59,58
		36.3	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	Indeks	74,68	83,3	111,54
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks kapasitas bencana	Indeks	Sedang (119)	Sedang (123,20)	86,67
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks demokrasi	Indeks	75	70,85	94,47

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)		Satuan (4)	Target (5)	Realisasi (6)	% (7)
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	49	49	100
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks Ketertiban Masyarakat	Indeks	95	92,20	97,05
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	41.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,16	59,60	99,07
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nidya (750)	Madya (650)	86,67
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	79,02	78,95	99,92
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,52	80,52	101,26
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Indeks	80	82,74	103,45
45	Pengembangan ketrasmigrasian	45.1	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	40,50	-80	-197,05

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 58 (lima puluh delapan) indikator yang sifatnya progresif, dan 9 (sembilan) indikator yang sifatnya represif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

A. **Indikator Progresif**, dengan hasil:

- a. Sebanyak 46 (enam puluh enam) Indikator Kinerja sasaran atau sebanyak 79,31% dengan Kriteria **Sangat Tinggi**;
- b. Sebanyak 7 (tujuh) atau sebanyak 12,07% dengan Kriteria **Tinggi**;
- c. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 1,72% dengan Kriteria **Sedang**;
- d. Sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 1,72% dengan Kriteria **Rendah**; dan
- e. Sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 5,17% dengan Kriteria **Sangat Rendah**, Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***sangat tinggi***, atau interval nilai realisasi kinerja $\geq 90,1$ sebanyak 46 (*empat puluh enam*), diantaranya:

1. Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
2. Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
3. Usia Harapan Hidup;
4. Persentase penguatan kapasitas PSKS;
5. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
6. Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda;
7. Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga;
8. Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan;
9. Persentase Kenaikan Kunjungan Masyarakat;
10. Indeks Profesionalitas ASN;
11. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
12. Persentase Raperda yang Disahkan Tepat Waktu;
13. Tingkat Konsistensi dan Ketepatan Waktu Perencanaan;
14. Persentase Kenaikan SKPD Mengelola Arsip Secara Baku;
15. Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel;
16. Level Maturitas SPIP;
17. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
18. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
19. Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara;
20. Indeks Kabupaten Peduli HAM;
21. Persentase Kesesuaian Capaian Pelaksanaan Pembangunan (Fisik dan Keuangan) dengan Target (rencana);
22. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik yang Sesuai Regulasi;
23. Persentase Publikasi Kebijakan dan Kegiatan Kepala Daerah;
24. Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah;
25. Persentase Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah;
26. Persentase Keterlibatan Stakeholder dalam Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kesra;
27. Persentase Desa yang Memiliki LEM, LED dan Posyantek;

28. Persentase Peningkatan PAD dari Sektor Pariwisata;
29. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB;
30. Persentase UMKM yang Memiliki Daya Saing;
31. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi (PMDN/PMA);
32. Angka Partisipasi Angkatan Kerja;
33. Besaran Pekerja/ Buruh Yang Menjadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan;
34. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB;
35. Indeks Layanan Infrastruktur;
36. Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan;
37. Ketaatan Terhadap RTRW;
38. Kelas Indeks Kapasitas Bencana;
39. Indeks Demokrasi;
40. Rata - rata Kader Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Sosial Budaya yang Aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan);
41. Indeks Ketertiban Masyarakat;
42. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
43. Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA);
44. Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan;
45. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat; dan
46. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.

b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***tinggi***, atau interval nilai realisasi kinerja ***75,1 ≤ 90*** sebanyak 6 (enam), diantaranya:

1. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;
2. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB;
3. Persentase Inovasi yang Diterapkan;
4. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA;
5. Rasio Penduduk yang Bekerja; dan
6. Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

c. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***sedang***, atau interval nilai realisasi kinerja ***65,1 ≤ 75*** sebanyak 1 (satu), yaitu Level Kapabilitas APIP.

d. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***rendah***, atau interval nilai realisasi kinerja ***50,1 ≤ 65*** sebanyak 1 (satu), yaitu Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya.

- e. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***sangat rendah***, atau interval nilai realisasi kinerja ≤ 50 sebanyak 3 (tiga), diantaranya:
1. Rasio daya serap tenaga kerja PMDN;
 2. Persentase IKM yang memiliki daya saing; dan
 3. Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi.

Berdasarkan *Capaian Kinerja Organisasi* Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan *Skala Nilai Peringkat Kinerja* sebagaimana diatur berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diperoleh hasil sebagaimana Diagram 3.1.

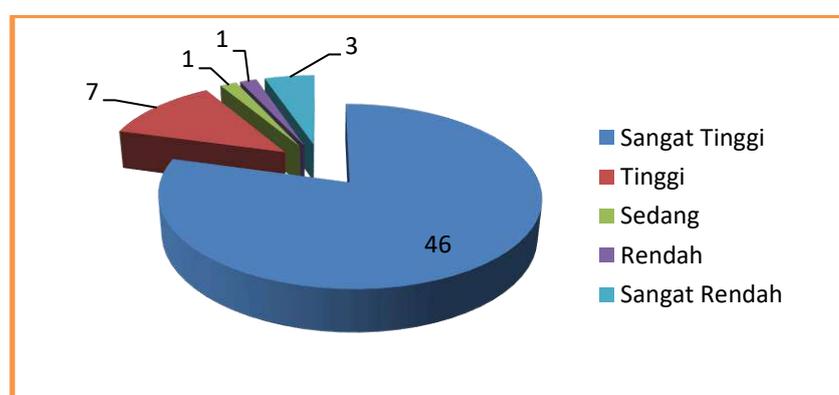


Diagram 3.1 Peringkat Kinerja Progresif

B. **Indikator Regresif**, dengan hasil: Sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 100% dengan Kriteria ***Baik (Berhasil Menekan)***, yaitu:

1. Kasus Kematian Ibu;
2. Angka Kematian Bayi;
3. Angka Kematian Balita;
4. Prevalensi Gizi Buruk (BB/U);
5. Tingkat Inflasi YoY;
6. Indeks Kualitas Air;
7. Indeks Kualitas Udara;
8. Indeks Tutupan Vegetasi (lahan); dan
9. Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*) /TFR.

Berdasarkan *Capaian Kinerja Organisasi* Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2018 sebagaimana diuraikan di atas, apabila ditarik kesimpulan berdasarkan *Skala Nilai Peringkat Kinerja Represif* maka diperoleh data sebagaimana Diagram 3.2

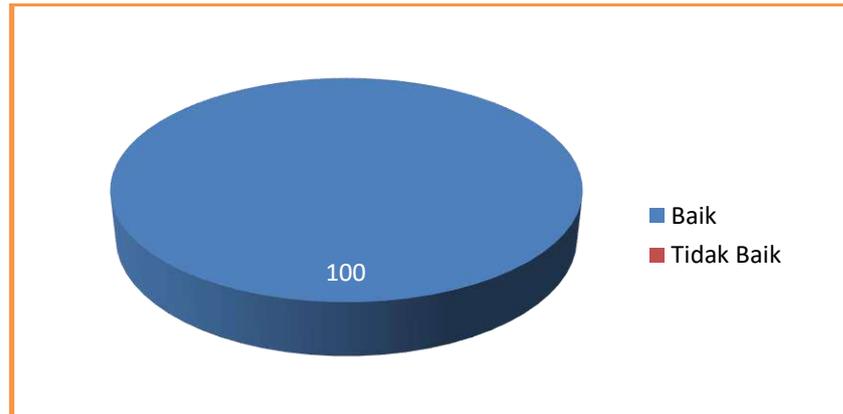


Diagram 3.2 Peringkat Kinerja Regresif

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pendidikan menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat didukung dengan Pelaksanaan Pendidikan Sepanjang Hayat di Kabupaten Klaten Tahun 2018 disusun tetap berdasarkan pencapaian pendekatan 6 (enam) pilar strategis, yakni: 1). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2). Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 3). Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life-skill*), 4). Pendidikan Keaksaraan, 5). Pengarusutamaan gender, dan 6). Peningkatan Kualitas Pendidikan. Sehingga capaian kinerja Pendidikan Sepanjang Hayat tahun 2018 merupakan gambaran keberhasilan capaian kinerja urusan pendidikan dalam mendukung pencapaian visi-misi pembangunan jangka menengah daerah.

Adapun capaian sasaran terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat sebagaimana Tabel 3.4.

Tabel 3.4

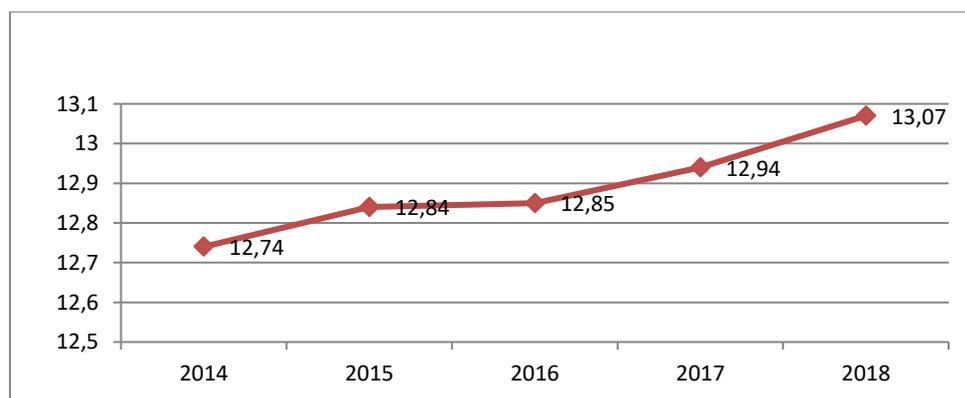
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Non Formal

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJM	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	43	48,00	61,05	127,19	55	111
2	Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	65	80,00	82,00	102,50	95	86,32

Capaian sasaran kinerja "Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal", sebagaimana tersebut di atas ditunjang beberapa indikator kinerja urusan pendidikan, diantaranya:

1) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2014-2018, yaitu dari sebesar 12,74 pada tahun 2014 menjadi sebesar 13,07 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin baik pada setiap jenjang pendidikan. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Grafik 3.1.

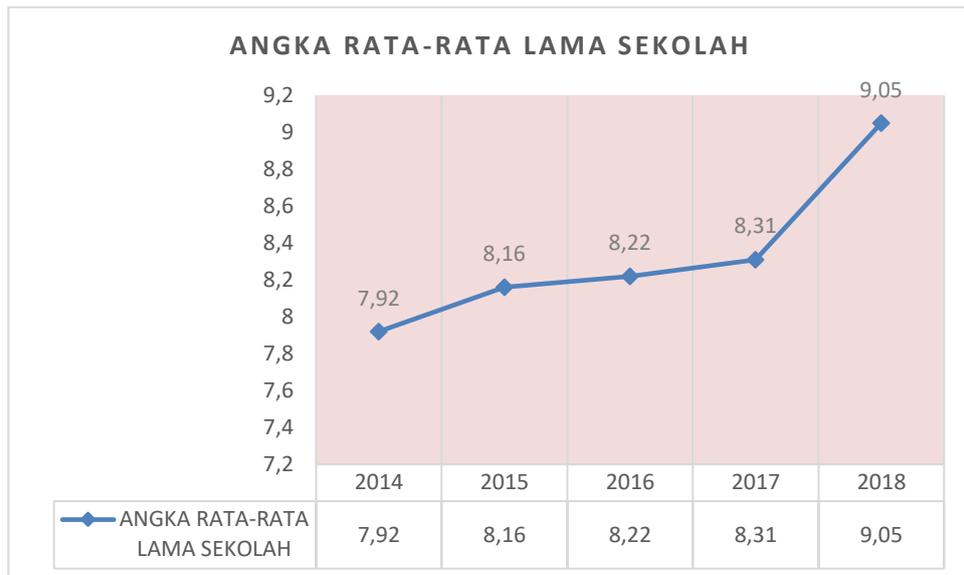


Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2019.

Grafik 3.1. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2014-2018, yaitu dari sebesar 7,92 pada tahun 2014 menjadi sebesar 9,05 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan untuk memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi semakin baik. Perkembangan Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 3.2.



Sumber: Dinas Pendidikan Kab Klaten, 2019.
Grafik 3.2. . Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan khususnya di dua tahun terakhir terjadi kenaikan sebesar 0,74 % dari tahun 2017 sebesar 8,31 menjadi 9,05 di tahun 2018, hal ini disebabkan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah yang berfokus pada intervensi anak usia sekolah untuk mengikuti program wajib pendidikan dasar dengan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2014-2018 mengalami perkembangan. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2014 sudah mencapai 92,27%, seiring dengan perbaikan layanan pendidikan, dan pada tahun 2018 naik menjadi 102,75%. Adapun untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B tumbuh dari 87,26% pada tahun 2014, dan

pada Tahun 2018 menjadi 95,21%. Hal ini disebabkan karena keinginan anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B banyak yang bersekolah dari luar daerah serta ditunjang angka melanjutkan dan proporsi jumlah penduduk anak usia SMP/MTs/SMPLB/Paket B juga meningkat. Secara rinci, perkembangan APK di Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 untuk semua jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2014-2018

No	Tahun	SD/MI/SDLB/ Paket A	SMP/MTs/SMP LB/Paket B	SMA/SMK/MA/ SMALB/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2014	92,27	87,26	68,69
2	2015	94,53	87,58	93,06
3	2016	105,23	97,57	81,00
4	2017	97,45	90,93	-
5	2018	102,75	95,21	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2019.

Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan Pendidikan Menengah menjadi kewenangan Provinsi.

4) Angka Partisipasi Murni (APM)

APM untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2014-2018 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2014 sudah mencapai 79,13%, naik menjadi 90,84% pada tahun 2018. Jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B pada tahun 2014 sudah mencapai 62,48% menjadi 64,07% hal ini dipicu adanya anak usia sekolah pada jenjang tertentu ingin sekolah di luar daerah, yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya. Perkembangan APM di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar disajikan pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6.

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2014-2018

No	Tahun	SD /MI /SDLB/Paket A	SMP/MTs/SMPLB/
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2014	79,13	62,48
2	2015	81,60	63,96
3	2016	91,26	72,77
4	2017	86,84	68,22
5	2018	90,84	64,07

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.6. sebagaimana tersebut di atas, yang mendesak untuk dilakukan adalah perkembangan APM untuk semua jenjang pendidikan sangat dipengaruhi kondisi masyarakat dan layanan pendidikan pada saat-saat tertentu, mengingat Klaten diapit dua kota besar, Yogyakarta dan Solo.

5) Angka Putus Sekolah

Perkembangan angka putus sekolah (APS) selama tahun 2014-2018 untuk semua jenjang pendidikan bersifat fluktuatif. Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7.

Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang
Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Uraian	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SD/MI	Kasus	31	27	33	44	20
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMP/MTS	Kasus	36	56	43	92	34
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMA/MA*)	Kasus	285	295	283	-	-

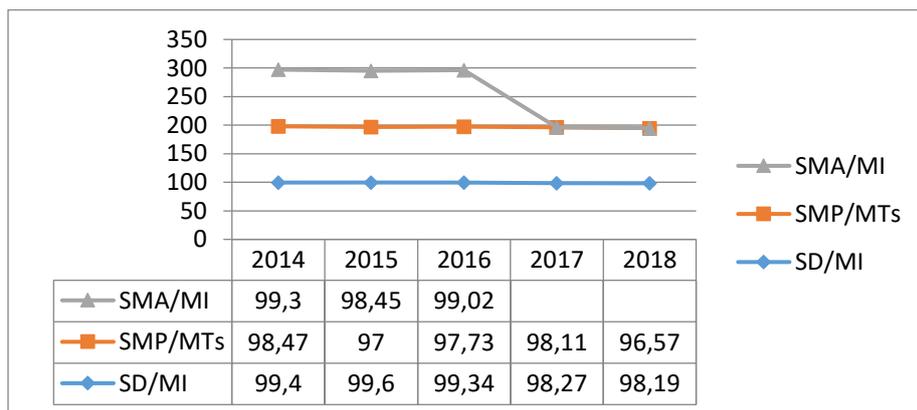
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2019.

Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan Pendidikan Menengah menjadi kewenangan Provinsi..

Berdasarkan Tabel 3.7. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa angka putus sekolah pada dua Tahun terakhir mengalami penurunan baik untuk angka putus sekolah tingkat SD/MI dari Tahun 2017 sebesar 44 % menjadi 20 % di Tahun 2018, sedangkan untuk angka putus sekolah SMP/MTS dari 92 % di Tahun 2017 menjadi 34 % di Tahun 2018, hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan dasar bidang pendidikan sudah terpenuhi dengan adanya program Pemerintah antara lain Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

6) Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan (AL) menunjukkan bobot prestasi kelulusan untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan. Adapun kondisi Angka Kelulusan (AL) untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2014-2018 bersifat fluktuatif. Perkembangan angka kelulusan tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 3.3.



Sumber: Dinas Pendidikan, 2019.

Grafik 3.3 Angka Kelulusan (AL) Tahun 2014-2018

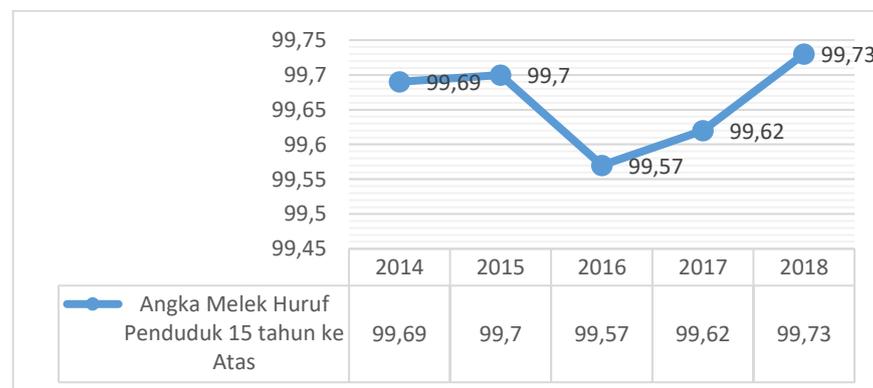
Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan Pendidikan Menengah menjadi kewenangan Provinsi..

Berdasarkan Grafik 3.3. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa angka kelulusan jenjang SD/MI cenderung mengalami penurunan terakhir dari 99,6% pada tahun 2015 menjadi 98,19 % di tahun 2018. Penurunan ini disebabkan seiring dengan angka putus sekolah, dan rendahnya kemampuan individu siswa (gagal kecerdasannya). Sedangkan untuk jenjang SMP/MTS dari 98,11 % di tahun 2017 menurun menjadi 96,57 % di tahun 2018, hal ini disebabkan karena banyak siswa kelas VI dan IX yang tidak meneruskan sekolahnya karena berbagai alasan.

7) Angka Melek Huruf

Indikator keberhasilan pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi angka buta huruf penduduk usia >15 Tahun ke atas. Beberapa langkah nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diantaranya dengan melakukan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.

Angka melek huruf pada penduduk usia lebih dari 15 Tahun ke atas dirumuskan dengan pengertian persentase penduduk usia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Adapun perkembangan angka melek huruf penduduk usia >15 Tahun ke atas di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 3.4.



Sumber: Dinas Pendidikan, 2019.

Grafik 3.4. . Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun ke atas di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Berdasarkan Grafik 3.4. sebagaimana tersebut di atas, angka melek huruf di Kabupaten Klaten pada dua Tahun terakhir mengalami kenaikan, dari 99,62 % di Tahun 2017 menjadi 99,73 % di Tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh penduduk Kabupaten Klaten sudah terbebas dari buta huruf.

8) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kurikulum Pendidikan Tahun 2013 mensyaratkan kualifikasi teknis yang semakin tinggi sehingga perlu dibarengi peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Sebagai gambaran perkembangan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8.

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Uraian	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SD/ MI	%	72,32	79,09	81,99	84,16	87,67
Jenjang Pendidikan SMP/ MTs	%	90,70	92,09	91,51	60,33	91,98
Jenjang Pendidikan SMA/ MA/ SMK	%	96,11	96,71	97,06	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2019

NB : Untuk data jenjang SMA/MA/SMK, tidak tersedia dikarenakan segala jenis administrasi sudah di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV selama lima tahun terakhir (Tahun 2014-2018) guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV semakin meningkat, hal ini tidak terlepas dari adanya dana tunjangan profesi guru yang sudah memiliki sertifikat profesi, dan bantuan keuangan dari Pemerintah provinsi untuk meningkatkan kapasitasnya.

Adapun data guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di SD/MI/, SMP/MTS berkualifikasi S1/D.IV dan bersertifikat Kepala Sekolah tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9.

Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi SI / D IV dan Bersertifikat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2014-2018

Uraian	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SD/ MI	%	95,13	98,08	98,76	98,27	99,00
Jenjang Pendidikan SMP/ MTs	%	98,13	96,58	96,78	93,55	96,92
Jenjang Pendidikan SMA/ MA/ SMK	%	90,36	89,64	97,53	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2019

NB : Untuk data jenjang SMA/ MA/ SMK, tidak tersedia dikarenakan segala jenis administrasi sudah dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Tabel 3.9. sebagaimana tersebut di atas, terdapat peningkatan jumlah Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi D4/SI dan bersertifikat di jenjang pendidikan SD/MI dari 98,27 % DI TAHUN 2017 menjadi 99,00 % di Tahun 2018 dan pendidikan SMP/MTS dari 93,55 % di Tahun 2017 menjadi 96,92 % di Tahun 2018. Jabatan Kepala Sekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI/SMP/MTS telah memenuhi kualifikasi S1/D4 standar sistem Pendidikan Nasional. Kepala Sekolah masing-masing telah tercapai 100%. Hal ini menandakan bahwa tingkat mutu guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang dipersyaratkan telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

9) Rasio Murid terhadap Guru

Rasio murid terhadap guru per jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 3.10, Tabel 3.11, dan Tabel 3.12.

Tabel 3.10.

Jumlah Sekolah, Murid, Guru SD Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Thdp Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prambanan	30	3.610	242	120	8	15
2	Gantiwarno	23	2.550	183	111	8	14
3	Wedi	28	3.417	245	122	9	14
4	Bayat	34	3.452	284	102	8	12
5	Cawas	40	3.427	341	86	9	10
6	Trucuk	39	4.583	360	118	9	13
7	Kalikotes	21	2.413	177	115	8	14
8	Kebonarum	11	934	82	85	7	11
9	Jogonalan	26	3.967	231	153	9	17
10	Manisrenggo	28	2.955	199	106	7	15
11	Karangnongko	25	2.465	182	99	7	14
12	Ngawen	23	2.565	182	112	8	14
13	Ceper	30	3.611	242	120	8	15
14	Pedan	24	3.048	225	127	9	14
15	Karangdowo	29	2.310	230	80	8	10
16	Juwiring	33	3.435	284	104	9	12
17	Wonosari	38	4.079	318	107	8	13
18	Delanggu	25	3.232	227	129	9	14
19	Polanharjo	28	2.165	216	77	8	10
20	Karanganom	26	2.380	201	92	8	12

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Thdp Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21	Tulung	29	2.614	236	90	8	11
22	Jatinom	35	4.515	315	129	9	14
23	Kemalang	25	3.074	198	123	8	16
24	Klaten Selatan	19	2.425	165	128	9	15
25	Klaten Tengah	20	3.987	225	199	11	18
26	Klaten Utara	14	2.846	149	203	11	19
Jumlah 2018		703	80.059	5.939	117	8	14
	2017	705	83.665	6.124	119	9	14
	2016	710	85.849	6.258	124	9	14
	2015	716	87.698	6.322	125	9	14
	2014	727	90.413	6.469	127	9	14

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.10. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio murid terhadap guru untuk jenjang pendidikan SD Negeri adalah sebesar 14%.

Tabel 3.11.

Jumlah Sekolah, Murid, Guru SD Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2018

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prambanan	2	520	33	260	17	16
2	Gantiwarno	2	497	33	249	17	15
3	Wedi	7	2.142	117	306	17	18
4	Bayat	4	838	49	210	12	17
5	Cawas	3	1.069	78	356	26	14
6	Trucuk	2	275	26	138	13	11
7	Kalikotes	-	-	-	-	-	-
8	Kebonarum	1	286	21	286	21	14
9	Jogonalan	2	315	29	158	15	11
10	Manisrenggo	1	67	6	67	6	11
11	Karangnongko	-	-	-	-	-	-
12	Ngawen	1	477	21	477	21	23
13	Ceper	4	502	33	126	8	15
14	Pedan	2	608	41	304	21	15
15	Karangdowo	2	153	22	-	-	-
16	Juwiring	5	557	58	111	12	10
17	Wonosari	3	459	35	153	12	13

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18	Delanggu	5	1.366	89	273	18	15
19	Polanharjo	1	166	12	166	12	14
20	Karanganom	4	717	48	179	12	15
21	Tulung	1	349	30	349	30	12
22	Jatinom	2	723	56	362	28	13
23	Kemalang	-	-	-	-	-	-
24	Klaten Selatan	3	263	26	88	9	10
25	Klaten Tengah	10	2.793	171	279	17	16
26	Klaten Utara	5	1.415	81	283	16	17
Jml	2018	72	16.557	1.115	199	14	12
	2017	66	14.979	1.031	227	16	15
	2016	65	14.280	973	188	13	12
	2015	57	13.015	883	191	14	11
	2014	53	11.437	789	177	13	11

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.10. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio murid terhadap guru untuk jenjang pendidikan SD Swasta adalah sebesar 12.

Tabel.3.12.

Jumlah Sekolah, Murid, Guru SMP Negeri Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014–2018

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prambanan	2	1.088	78	544	39	14
2	Gantiwarno	3	1.741	119	580	40	15
3	Wedi	2	1.575	95	788	48	17
4	Bayat	3	1.557	120	519	40	13
5	Cawas	3	1.369	112	456	37	12
6	Trucuk	3	1.638	108	546	36	15
7	Kalikotes	1	847	45	847	45	19
8	Kebonarum	1	641	37	641	37	17
9	Jogonalan	2	1.364	90	682	45	15
10	Manisrenggo	3	1.870	117	623	39	16
11	Karangnongko	1	524	35	524	35	15
12	Ngawen	1	751	40	751	40	19

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Ceper	3	1.634	121	545	40	14
14	Pedan	3	1.855	124	618	41	15
15	Karangdowo	4	2.605	155	651	39	17
16	Juwiring	2	1.282	86	641	43	15
17	Wonosari	2	1.473	95	737	48	16
18	Delanggu	4	2.474	147	619	37	17
19	Polanharjo	3	1.171	81	390	27	14
20	Karanganom	4	1.886	128	472	32	15
21	Tulung	3	1.488	102	496	34	15
22	Jatinom	3	1.855	119	618	40	16
23	Kemalang	2	916	61	458	31	15
24	Klaten Selatan	1	655	44	655	44	15
25	Klaten Tengah	3	2.370	136	790	45	17
26	Klaten Utara	3	2.520	171	840	57	15
Jml	2018	65	39.149	2.566	617	40	15
	2017	65	39.927	2.508	614	39	16
	2016	65	40.672	2.721	640	42	15
	2015	65	40.927	2.740	637	42	15
	2014	65	40.441	2.777	633	43	15

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.12. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio murid terhadap guru untuk jenjang pendidikan SMP Negeri adalah sebesar 15.

Tabel 3.13.

Jumlah Sekolah, Murid, Guru SMP Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prambanan	1	209	13	209	13	16
2	Gantiwarno	2	127	21	64	11	6
3	Wedi	4	374	44	94	11	9
4	Bayat	2	371	27	186	14	14
5	Cawas	4	347	49	87	12	7
6	Trucuk	4	191	50	48	13	4
7	Kalikotes	-	-	-	-	-	-

No	Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rata-rata Murid per Sekolah	Rata-rata Guru per Sekolah	Rasio Murid Terhadap Guru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Kebonarum	-	-	-	-	-	-
9	Jogonalan	1	148	15	148	15	10
10	Manisrenggo	1	67	15	67	15	4
11	Karangnongko	1	13	9	13	9	1
12	Ngawen	3	541	49	180	16	11
13	Ceper	-	-	-	-	-	-
14	Pedan	1	25	10	25	10	3
15	Karangdowo	1	47	6	47	6	8
16	Juwiring	3	269	42	90	14	6
17	Wonosari	2	83	23	42	12	4
18	Delanggu	4	364	47	91	12	8
19	Polanharjo	-	-	-	-	-	-
20	Karanganom	2	188	28	94	14	7
21	Tulung	1	-	10	-	-	-
22	Jatinom	2	303	22	152	11	14
23	Kemalang	2	82	13	41	7	6
24	Klaten Selatan	2	550	46	275	23	12
25	Klaten Tengah	2	369	28	185	14	13
26	Klaten Utara	4	1.335	81	334	20	16
Jml	2018	49	6.003	648	95	10	7
	2017	47	5.631	428	120	9	13
	2016	46	4.855	611	106	13	9
	2015	45	5.357	607	99	12	7
	2014	42	5.379	627	105	13	7

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.13. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa rata-rata rasio murid terhadap guru untuk jenjang pendidikan SMP Swasta adalah sebesar 7 – 13.

10) Manajemen Pelayanan Pendidikan

Manajemen Pelayanan Pendidikan diukur dengan indikator Angka melanjutkan sekolah dari Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Klaten di tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14.
Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs	99,40	100,37	98,87	99,26	99,30
Angka Melanjutkan dari SMP/ MTs ke SMA/ MA/ SMK	89,16	96,64	92,43	88,28	95,48

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Klaten, 2019

Berdasarkan Tabel 3.13. sebagaimana tersebut di atas, peserta didik di jenjang pendidikan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTS pada tahun 2014-2018 perkembangannya bersifat fluktuatif, begitu pula untuk jenjang SMP/MTs. Hal ini mengkondisikan, bahwa angka melanjutkan sangat bersifat situasional.

11) Sarana dan Prasarana Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan sangat berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar dan tentunya akan juga sangat berpengaruh terhadap capaian kualitas pendidikan di Kabupaten Klaten. Perkembangan kondisi Sarana dan Prasarana Sekolah dalam kondisi baik selama tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15.
Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik
Tahun 2014-2018

Uraian	Satuan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sekolah pendidikan SD/MI dalam kondisi baik	%	71,55	69,67	69,29	81,00	79,00
Sekolah pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA dalam kondisi baik	%	89,20	89,61	88,23	96,30	80,00

Sumber : Dinas Pendidikan, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.15. sebagaimana tersebut di atas kondisi ruang kelas gedung sekolah masih terdapat ruang kelas dalam kondisi tidak layak meskipun persentasenya kecil, sehingga rehabilitasi ruang kelas menjadi hal mutlak yang harus dilaksanakan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait pemenuhan Pendidikan Sepanjang Hayat bagi masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis **“Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal”** terdiri dari 6 (enam) program, diantaranya:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun;
3. Pendidikan Menengah;
4. Pendidikan Non Formal;
5. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
6. Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Permasalahan

Urusan Pendidikan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Masih tingginya angka anak usia sekolah, tetapi tidak sekolah;
- b. Kualitas kelulusan siswa belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja dan dunia usaha;
- c. Belum semua guru memenuhi kualifikasi standar minimal yang dipersyaratkan (D-4/S.1);
- d. Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas;
- e. Belum meratanya kualitas pendidikan di semua jenjang pendidikan;
- f. Belum optimalnya penanaman nilai-nilai moralitas, budi pekerti dan integritas; dan
- g. Kurang meratanya penyebaran jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar, terutama pada SD Negeri yang memungkinkan untuk diregruping.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan pendidikan, diantaranya:

- a. Perlunya peningkatan kualitas *pamong belajar* untuk mendampingi dan atau menekan anak putus sekolah dengan belajar mandiri;
- b. Perlunya kerjasama dengan dunia usaha untuk meningkatkan kualitas kelulusan siswa agar memiliki kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja dan dunia usaha;
- c. Perlunya sertifikasi dan peningkatan kualifikasi guru agar memiliki standar minimal yang dipersyaratkan (D-4/S.1); dan
- d. Perlunya pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas untuk semua jenjang pendidikan.

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian , Angka Kesakitan dan Kecacatan;

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa azas penyelenggaraan kesehatan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, norma-norma keagamaan. Serta memperhatikan ketentuan Pasal 3, dinyatakan bahwa tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Mengingat kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan.

Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya Urusan Kesehatan dengan parameter aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan indikator meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Juga dasar Undang-Undang 23 Tahun 2014 urusan kewenangan daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan urusan kesehatan mencakup diantaranya :1. Upaya kesehatan, 2. Sumber Daya Manusia Kesehatan, 3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, dan 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Adapun capaian sasaran terwujudnya Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan sebagaimana Tabel 3.16

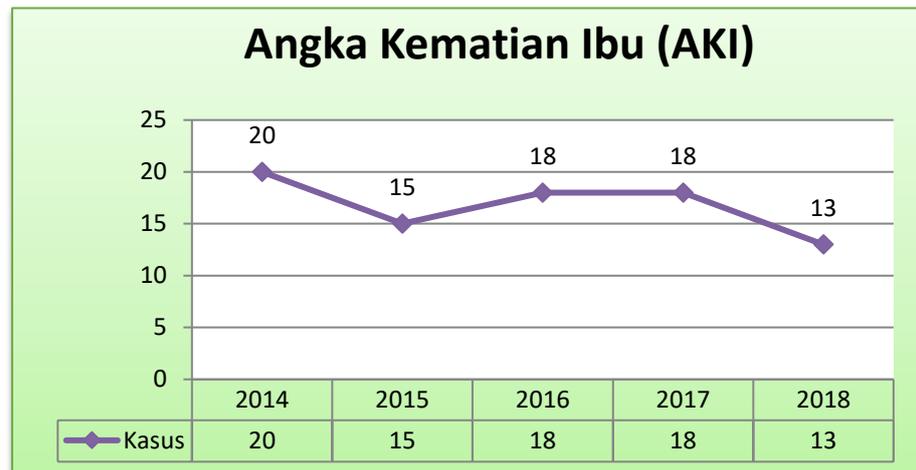
Tabel 3.16

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka
kematian, angka kesakitan dan kecacatan**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Kasus kematian Ibu	15	17	13	123,53	14	92,86
2	Angka Kematian Bayi	12,94	10,13	10,7	94,37	10,07	94,11
3	Angka Kematian Balita	2,99	1,67	1,9	86,23	1,61	118,01
4	Prevalensi Gizi Buruk (BB/U)	0,75	0,73	0,56	123,29	0,70	80

1. Kasus Kematian Ibu Melahirkan

Perkembangan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 dapat disajikan pada Grafik 3.5.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2019.

Grafik 3.5 Perkembangan Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Berdasarkan Grafik 3.5. sebagaimana tersebut di atas, kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab kematian ibu, di samping akibat hipertensi dan pendarahan, juga disebabkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu yang tinggi. Adapun kasus kematian ibu melahirkan selama tahun 2014-2018 menurut kecamatan dan Puskesmas disajikan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17.

Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Kecamatan	Puskesmas	Kematian Ibu Melahirkan				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Prambanan	Prambanan	0	2	0	0	2
		Kebondalem Lor	0	0	0	0	0
2	Gantiwarno	Gantiwarno	1	0	0	1	0
3	Wedi	Wedi	0	1	3	0	1
4	Bayat	Bayat	3	1	0	1	1
		Cawas I	1	0	0	2	1
5	Cawas	Cawas II	1	1	0	1	1
		Trucuk I	1	1	1	1	0
6	Trucuk	Trucuk II	1	0	0	1	0
		Kalikotes	1	0	1	0	0
7	Kalikotes	Kalikotes	1	0	1	0	0
8	Kebonarum	Kebonarum	0	0	0	0	0
9	Jogonalan	Jogonalan I	0	2	1	1	0
		Jogonalan II	0	0	0	0	0
10	Manisrenggo	Manisrenggo	0	0	1	0	1
11	Karangnongko	Karangnongko	0	0	0	1	0
12	Ngawen	Ngawen	1	0	0	0	0
13	Ceper	Ceper	1	0	0	2	0
		Jambukulon	2	0	1	0	0
14	Pedan	Pedan	1	1	0	0	1
15	Karangdowo	Karangdowo	0	0	1	1	1
16	Juwiring	Juwiring	0	0	3	0	0
17	Wonosari	Wonosari I	0	0	0	1	1
		Wonosari II	0	0	1	0	0
18	Delanggu	Delanggu	1	0	1	1	0
19	Polanharjo	Polanharjo	0	1	0	0	1
20	Karanganom	Karanganom	0	1	0	2	1
21	Tulung	Tulung	0	0	0	0	0
		Majegan	0	0	1	0	0
22	Jatinom	Jatinom	1	0	0	0	1
		Kayumas	0	0	1	0	0
23	Kemalang	Kemalang	1	1	0	2	0
24	Klaten Selatan	Klaten Selatan	2	1	0	0	0
25	Klaten Tengah	Klaten Tengah	1	1	1	0	0
26	Klaten Utara	Klaten Utara	0	1	1	0	0
Jumlah			20	15	18	18	13

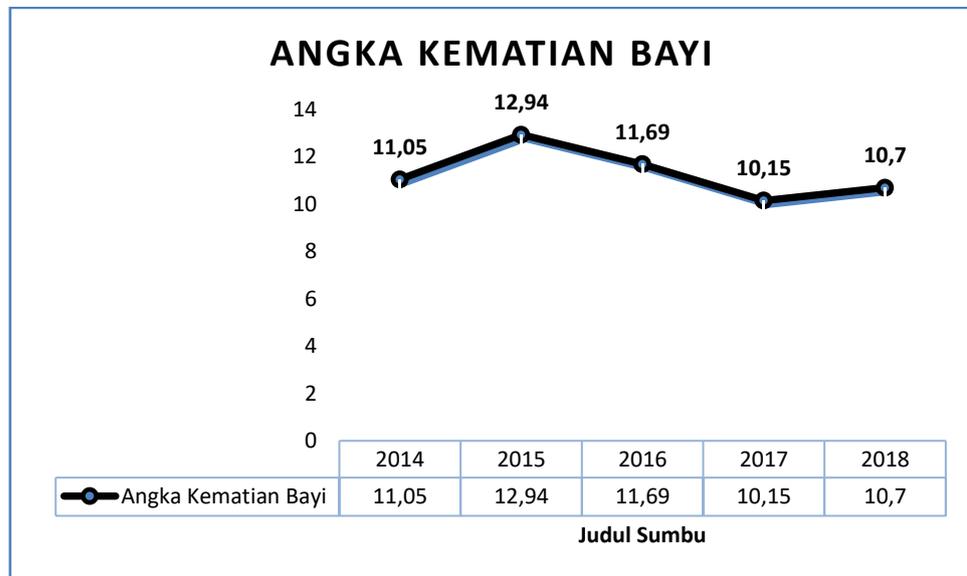
Sumber: Dinas Kesehatan, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.17 sebagaimana tersebut di atas bisa dilihat bahwa setiap tahun masih ada ibu mati karena melahirkan, hal ini bisa disebabkan salah satunya karena alur pelayanan di fasilitas kesehatan yang agak panjang, terlebih untuk yang memakai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mana rujukan harus dilakukan ketika ibu yang hendak melahirkan memerlukan penanganan di fasilitas kesehatan yang lebih memadai, namun banyak kendala dalam penerapannya. Skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) membuat pasien harus mengikuti alur rujukan sesuai aturan dan ini terkadang membuat pasien terlambat

ditangani dan masih banyak faktor medis dan non medis lainnya yang menyebabkan kasus kematian ibu melahirkan cukup tinggi.

2. Angka Kematian Bayi dan Balita

Kondisi Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 3.5.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2019.

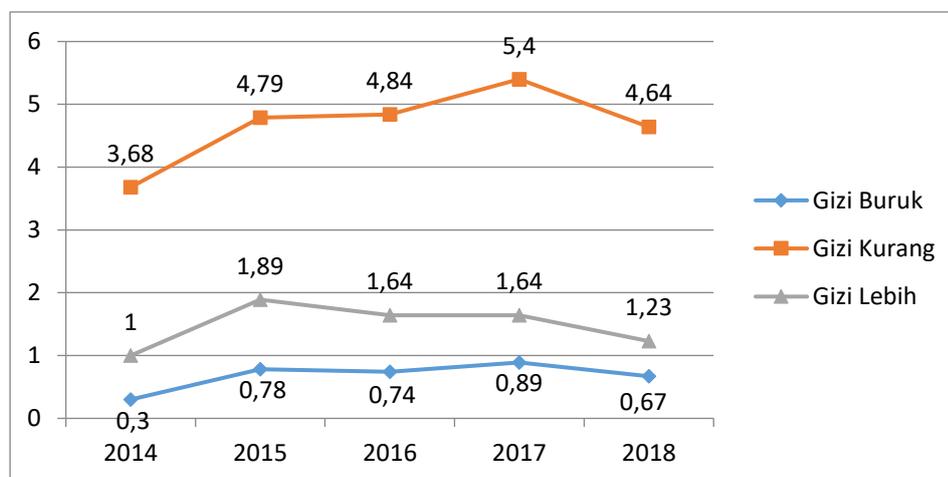
Grafik 3. 6. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Berdasarkan Grafik 3.6. sebagaimana tersebut di atas angka kematian bayi dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 cenderung bersifat fluktuatif. Meski dalam tiga Tahun terakhir mengalami penurunan, tetapi Tahun 2018 angka kematian bayi cenderung naik. Penyebab Kematian bayi terbanyak adalah BBLR, Asfiksia dan kelainan kongenital. Derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan terutama di wilayah kecamatan dengan kasus kematian bayi yang tinggi, seperti Kecamatan: Juwiring, Bayat, Trucuk I dan Delanggu.

3. Prevalensi Gizi Buruk

Balita dengan status gizi buruk masih menjadi masalah karena berbagai penyebab. Penyebab balita mengalami gizi buruk karena: asupan makan yang kurang, pola jajanan makanan yang tidak memenuhi zat gizi, pola asuh orang tua yang tidak telaten memenuhi kebutuhan zat gizi anak asuhannya.

Kasus *underweight* (gizi buruk dan gizi kurang) dengan indikator berat badan menurut umur di Kabupaten Klaten selama Tahun 2014-2018 dari hasil pengukuran serentak dapat disajikan pada Grafik 3.6.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2019.

Grafik 3.7. Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Berdasarkan Grafik 3.7. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat perkembangan selama tahun 2014-2018 dapat diturunkan. Namun ada beberapa wilayah yang perlu mendapat perhatian terkait kasus gizi buruk murni tanpa penyakit penyerta, diantaranya Kecamatan: Delanggu, Jogonalan, Trucuk, Wonosari, Kalikotes, Prambanan, Jatinom, Gantiwarno.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis “**peningkatan derajat kesehatan masyarakat**” terdiri dari 13 (tiga belas) program, diantaranya:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Obat dan Perbekalan Kesehatan;
3. Pengawasan Obat dan Makanan;
4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Perbaikan Gizi Masyarakat;
6. Pengembangan Lingkungan Sehat;
7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
8. Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
9. Pelayanan Kesehatan masyarakat Miskin;
10. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;

11. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; dan
13. Pelayanan Kesehatan.

Permasalahan

Urusan Kesehatan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Masih diketemukannya kasus kematian ibu dan bayi.
- b. Angka kesakitan demam berdarah masih ditemui, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman pandemik flu burung, serta penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya :
 - Demam berdarah dengue .
 - Malaria
 - Filariatis
- c. Untuk jenis penyakit menular / infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Militus (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker). Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya:
 - Penyakit menular Tuberculosis paru
 - Kusta penderita PB
 - Diare
 - Infeksi Saluran Pernapasan atas
 - HIV
 - Kejadian luar biasa KIPI
- d. Keadaan gizi : Berat Badan (BB) naik, BB di bawah garis merah dan Gizi buruk
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan.
- f. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah, diantaranya: kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sebelum makan dan sesudah buang air besar, serta kebiasaan merokok di masyarakat masih tinggi, dan
- g. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat;

- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan *antenatal care* (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil.

3. Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitian oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit;

Kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitian oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit didorong dengan mengutamakan dan mengoptimalkan pelayanan Rumah Sakit Daerah (RSD) didukung dengan kinerja Puskesmas untuk menekan angka kematian.

Adapun capaian sasaran "Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitian oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit" sebagaimana Tabel 3.18.

Tabel 3.18.

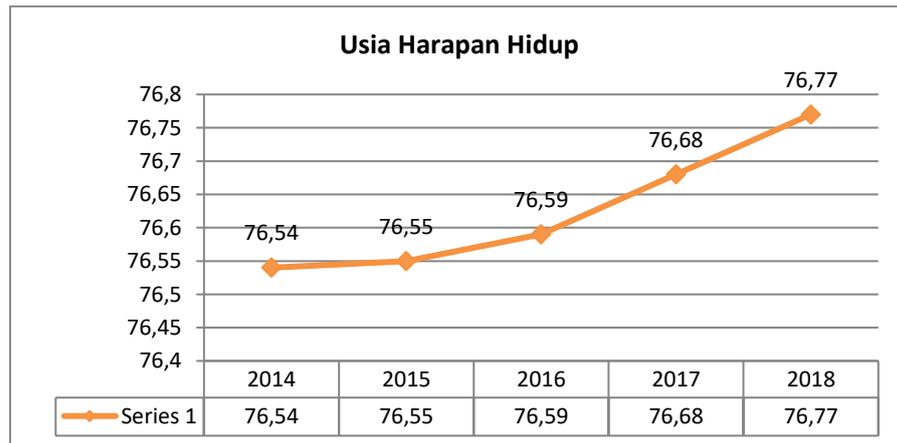
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitian oleh Masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Usia Harapan Hidup	76,59	76,62	76,77	100,20	76,62	100,20

Sumber: Dinas Kesehatan, 2019.

Usia harapan hidup (UHH) dalam arti usia hidup panjang dan sehat, di samping sebagai cerminan terhadap ukuran peningkatan

kesejahteraan penduduk, juga menjadi indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Selama kurun waktu 2014-2018 UHH cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup bersih dan sehat, termasuk upaya pemberian asupan yang semakin berkualitas terhadap anak usia dini atau anak usia Bawah Lima Tahun (BALITA). Perkembangan UHH di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Grafik 3.8.

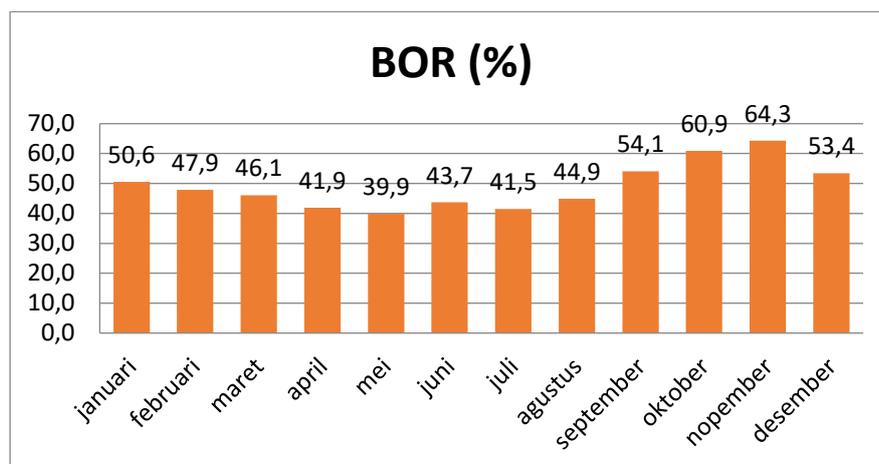


Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2019, diolah.

Grafik 3.8. Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

1) Cakupan Pelayanan RSD Bagas Waras

Kinerja pelayanan RSD Bagas Waras diukur dari indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu). BOR Tahun 2018 adalah 49,1% dengan jumlah per bulan disajikan pada Grafik 3.9.

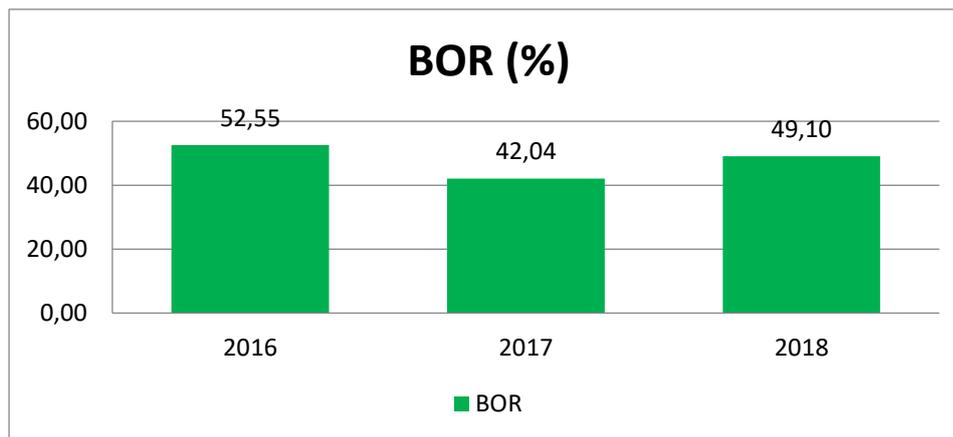


Sumber : RSD Bagas Waras, 2019

Grafik 3.9. Indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu Menurut Bulan Tahun 2018)

Di samping itu, pada Tahun 2018 , jumlah kunjungan pasien sebanyak 70.161 jiwa dengan perincian: 1). Rata-rata kunjungan rawat inap sebanyak 7.214 orang/Tahun (atau rata-rata 20 orang/hari), 2). Rata-rata kunjungan rawatjalan sebanyak 53.272 orang/Tahun (atau rata-rata 146 orang/hari), dan 3). Rata-rata kunjungan IGD sebanyak 9.675 orang/Tahun (atau rata-rata 26 orang/hari).

Adapun kinerja pelayanan RSD Bagas Waras dapat dilihat pada Grafik 3.10.



Sumber : RSD Bagaswaras, 2019.

Grafik 3.10. Indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu Tahun 2016-2018)

Berdasar pada Grafik 3.9. dan Grafik 3.10. indikator BOR di atas terlihat bahwa pada Tahun 2018 terjadi kenaikan persentase pemakaian tempat tidur dibanding Tahun 2017 sebesar 7,06.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis **“meningkatkan pemanfaatan pelayanan kerumahsakitannya oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit”** dengan program utama Pelayanan Kesehatan, dengan didukung beberapa program, diantaranya:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Obat dan Perbekalan Kesehatan;
3. Pengawasan Obat dan Makanan;
4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Perbaikan Gizi Masyarakat;
6. Pengembangan Lingkungan Sehat;
7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

8. Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
9. Pelayanan Kesehatan masyarakat Miskin;
10. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
11. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata; dan
12. Peningkatan Pelayanan kesehatan lansia, Ibu dan Anak.

Permasalahan

Urusan Kesehatan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Angka kesakitan demam berdarah masih ditemui, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman pandemik flu burung, serta penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya :
 - a. Demam berdarah dengue .
 - b. Malaria
 - Filariatis
2. Untuk jenis penyakit menular / infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Militus (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker). Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya:
 - a. Penyakit menular Tuberculosis paru
 - b. Kusta penderita PB
 - c. Diare
 - d. Infeksi Saluran Pernapasan atas
 - e. HIV
 - f. Kejadian luar biasa KIPI
3. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat;
- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan *antenatal care* (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil.

4. Sasaran Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM;

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien bisanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM, sehingga sasaran strategis yang hendak dicapai dapat diukur.

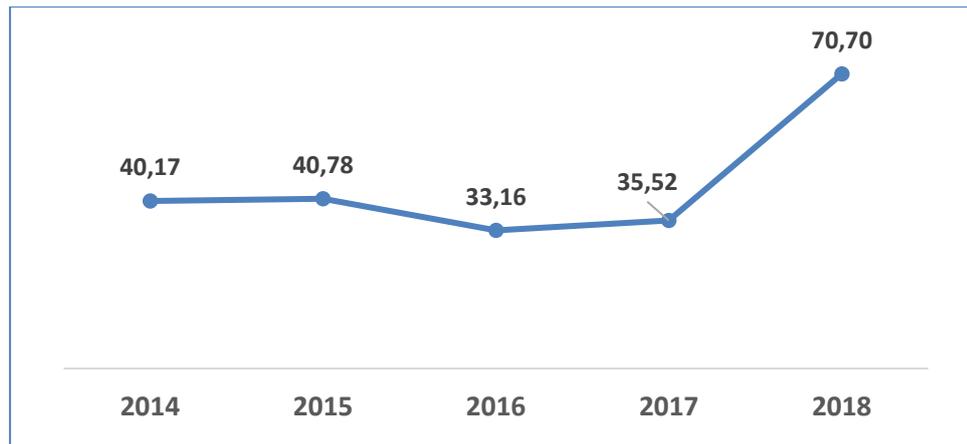
Adapun capaian sasaran Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM sebagaimana Tabel 3.19.

Tabel 3.19.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS
dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	35,52	83	70,66	85,13	89	79,39
2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	90	96	96	100	100	96
3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	13,9	13,3	14,32	107,67	12,9	111,01
4	Persentase penduduk miskin	14,59	14,12	12,96	89,16	14,00	92,57

Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten hingga saat ini. Program-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan PMKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan kinerja layanan sosial diukur dengan PMKS yang memperoleh bantuan, dan persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi Sejenis Lainnya. Perkembangan PMKS yang memperoleh bantuan dapat tahun 2014–2018 disajikan pada Grafik 3.11.



Sumber: Dinas Sosial P3AKB, 2019.

Grafik 3.11. PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2014–2018

Berdasarkan Grafik 3.11. sebagaimana tersebut di atas, karena dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran Pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat akan bisa membuahkan hasil yang maksimal. Terhadap keluarga rawan sosial yang jumlahnya relatif sudah semakin berkurang, namun demikian tetap harus mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis *“Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM,”* diantaranya:

1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; dan
3. Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial.

Permasalahan

Urusan Sosial dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Masih banyaknya masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum terselesaikan;
2. Minimnya sarana dan prasarana Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; dan
3. Banyaknya Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Gepeng) yang dibuang/dilepas dari daerah lain.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan sosial, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi petugas sosial dan layanan sosial masyarakat;
- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan penanganan Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Eks. Penyandang Penyakit Sosial.

5. Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*);

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menekan angka kelahiran diupayakan dengan pelayanan keluarga berencana. Adapun capaian sasaran “**Menurunnya angka kelahiran (*Total Fertility Rate*)**” sebagaimana Tabel 3.20.

Tabel 3.20.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Menurunnya angka kelahiran (*Total Fertility Rate*)

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR	2,2	2,16	1,91	111,60	2,1	109,05

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menurunkan angka kelahiran dengan melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan indikator:

1. Jumlah Peserta KB dan KB Aktif

Jumlah peserta KB baru dalam kurun waktu Tahun 2014-2018 mengalami peningkatan secara fluktuatif. Peserta KB baru pada Tahun 2014 sebanyak 28.254 peserta, dan pada Tahun 2015 turun menjadi 23.559 peserta KB baru, namun pada Tahun 2018 turun lagi menjadi 15.565 peserta KB baru. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran pasangan usia subur dalam menyiapkan keluarga sejahtera, dan kondisi sosial masyarakat. Gambaran peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.21.

Tabel 3.21.

Peserta KB dan KB Aktif di
Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Tahun	Pasangan Usia Subur	Peserta KB Baru	Peserta KB Aktif
2014	206.812	28.254	172.333
2015	203.448	23.559	154.422
2016	201.950	26.461	158.943
2017	211.577	23.783	169.626
2018	196.717	15.565	137.109

Sumber : Dinas Sosial, P3AKB Kab. Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.21. sebagaimana tersebut di atas, mengalami peningkatan secara fluktuatif. Peserta KB baru pada tahun 2014 sebanyak 28.254 peserta, dan pada tahun 2015 turun menjadi 23.559 peserta KB baru, namun pada tahun 2018 turun lagi menjadi 15.565 peserta KB baru.

2. Jumlah Keluarga Sejahtera

Perkembangan jumlah keluarga sejahtera tahun 2014-2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2018 jumlah keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I (KS I), dan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) sebanyak 372.750 jiwa. Data tersebut mengindikasikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencapai hasil yang optimal. Jumlah Pra Sejahtera, KS I, dan keluarga sejahtera tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.22.

Tabel 3.22.

Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya
di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

Kecamatan	Pra Sejahtera	KS-I	KS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	1.425	3.103	9.233	4.528
02 Gantiwarno	2.110	2.275	8.356	4.385
03 Wedi	1.626	3.234	11.195	4.860
04 Bayat	5.644	3.182	8.413	8.826
05 Cawas	2.689	4.003	12.151	6.692
06 Trucuk	4.724	4.302	13.411	9.026
07 Kalikotes	894	2.402	6.806	3.296
08 Kebonarum	370	1.203	3.946	1.573
09 Jogonalan	1.812	3.519	10.835	5.331

Kecamatan	Pra Sejahtera	KS-I	KS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10 Manisrenggo	1.754	3.441	7.972	5.195
11 Karangnongko	2.002	2.116	7.311	4.118
12 Ngawen	1.165	4.137	9.269	5.302
13 Ceper	1.222	5.268	14.080	6.490
14 Pedan	1.395	3.433	9.534	4.828
15 Karangdowo	3.135	2.603	9060	5.738
16 Juwiring	1.740	3.777	10.022	5.517
17 Wonosari	2.956	3.682	10.206	6.638
18 Delanggu	481	2.897	8.103	3.378
19 Polanharjo	1.146	2.802	8.551	3.948
20 Karanganom	1.343	3.305	9.444	4.648
21 Tulung	2.588	2.986	9.629	5.574
22 Jatinom	4.129	3.149	8.719	7.278
23 Kemalang	3.239	2.468	6.341	5.707
24 Klaten Selatan	1.016	3.165	8.998	4.181
25 Klaten Tengah	941	2.369	8.318	3.310
26 Klaten Utara	1.142	2.867	8471	4.009
2018	52.688	81.688	238.374	372.750
2017	80.935	114.736	192.994	388.665
2016	67.400	83.239	239.583	390.222
2015	68.814	80.446	236.200	385.460
2014	65.271	75.559	223.226	364.056

Sumber : Dinas Sosial, P3AKB Kab. Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.22. sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2018 jumlah keluarga Pra Sejahtera sebanyak 52.688 jiwa, jumlah Keluarga Sejahtera I (KS I) sebanyak 81.688 jiwa, dan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) sebanyak 238.374 jiwa.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kelahiran. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis “angka kelahiran (Total Fertility Rate)”, diantaranya:

1. Keluarga Berencana;
2. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja; dan
3. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri.

Permasalahan

Urusan keluarga berencana untuk menekan angka melahirkan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Tingginya angka drop out KB; dan
2. Banyak Pasangan usia subur.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan keluarga berencana, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi masyarakat, terutama pasangan usia subur;
- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan penanganan keluarga berencana.

6. Sasaran Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga;

Lembaga atau organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Klaten meliputi: (a) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI); (b) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda; (c) Lembaga Sosial Pemuda, Lembaga kepemudaan yang umumnya berbentuk Yayasan; (d) Organisasi Pemuda Partai Politik; (e) Organisasi Kemahasiswaan; (f) Praja Muda Karana (Pramuka); (g) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SLTA; (h) Karang Taruna; (i) Organisasi Pemuda Kedaerahan; (j) Lembaga Pemuda Profesi; (k) Perkumpulan Pemuda di bidang Seni; (l) Klub Ilmuwan Muda; dan (m) Lembaga Pemuda Pencinta Alam (n) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Lembaga-lembaga tersebut sebagian besar secara organisasi bisa berjalan namun kualitas dan kapasitasnya masih rendah, sehingga masih perlu adanya pembinaan secara simultan oleh pihak-pihak yang terkait.

Adapun capaian sasaran "Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga" sebagaimana Tabel 3.23.

Tabel 3.23.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	5	10	12	120	60	20,00
2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	5	5	5	100	30	16,67

Perkembangan jumlah organisasi kepemudaan dan jumlah organisasi olahraga relatif stabil, hanya saja kegiatan keolahragaan yang khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas masih sangat rendah. Jumlah klub/cabang olahraga mengalami penurunan, hal ini menunjukkan pembinaan terhadap klub/cabang olahraga masih kurang. Sedangkan jumlah gedung olah raga sudah cukup merata disetiap kecamatan, namun yang memenuhi standar sarana dan prasarana gedung olahraga baru ada dua yaitu GOR Gelar Sena dan Stadion Trikoyo.

Perkembangannya kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel 3.24.

Tabel 3.24.

Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jml klub/cabang olahraga	Cabang	31	31	31	31	31
2.	Jml gedung Olahraga Tk. Kecamatan	Gedung	26	26	26	26	26
3.	Jml Organisasi Pemuda	Organisasi	26	26	29	29	29
4.	Jml Organisasi Olahraga	Organisasi	8	8	35	35	35

Sumber : Disparbudpora Kabupaten Klaten, 2019.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas pemuda dan olahraga. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis "Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga," diantaranya:

1. Peningkatan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan; dan
2. Pembinaan dan Pemasyaratan Olahraga.

Permasalahan

Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Usia produktif memiliki kepekaan psikologis sesuai dengan pilihannya sendiri, kadang program kepemudaan Pemerintah kurang menyentuh kebutuhan pemuda secara umum; dan
2. Rendahnya prestasi olahraga, karena minimnya pembinaan dan penghargaan bagi atlet berprestasi.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi pemuda, sesuai dengan dinamika yang berkembang; dan
- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan pendampingan pemuda dan atlet berbakat; dan
- c. Pemberian penghargaan yang sepadan bagi atlet dan pemuda yang berprestasi.

7. Sasaran Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya

Upaya Pemerintah kabupaten dalam meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya dengan melakukan berbagai event dan baluran budaya daerah. Langkah ini diharapkan akan memperkuat daya saing daerah melalui seni dan budaya.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya sebagaimana Tabel 3.25.

Tabel 3.25.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	5	6	3,2	53,33	6	53,33
2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	7	10	14,3	143	10	143

1. Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta sarana penyelenggaraan seni dan budaya selama tahun 2014-2018 dapat disajikan pada Tabel 3.26.

Tabel 3.26.

Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan Budaya	kegiatan	52	52	52	52	28
2	Jumlah sarana Penyelenggaraan seni dan Budaya	Tempat	12	12	12	12	12

Sumber : Disparbudpora Kab. Klaten, 2019.

Promosi, pengembangan dan pembinaan seni budaya daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan pengiriman Tim kesenian Kabupaten ke TMII, ke Provinsi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten lain. Begitu juga dengan pemberian bantuan keuangan kepada sanggar-sanggar kesenian yang ada di Kabupaten Klaten semakin intensif.

Upaya untuk perlindungan dan pelestarian seni budaya daerah akan didaftarkan melalui HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual), diantaranya: a) Lurik ATBM; b) Tari Lurik Payung; dan c) Tari Lurik Asri. Begitu juga dengan pelestarian dan penggunaan bahasa Jawa dialek Yogyakarta-Surakarta yang diimplementasikan dalam bentuk lomba dongeng Bahasa Jawa, Lomba Dalang Muda, dan mewajibkan penggunaan bahasa Jawa halus setiap hari Kamis di semua OPD Kabupaten Klaten.

2. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan.

Selama tahun 2014-2018 perkembangan jumlah cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten tidak ada perubahan. Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel 3.27.

Tabel 3.27.

Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan
di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Candi Purbakala	Jumlah	8	8	8	8	8
2	Jumlah Makam	Jumlah	4	4	4	4	4
3	Pemandangan Alam	buah	2	2	2	2	2
4	Museum	buah	1	1	1	1	1

Sumber : Disparbudpora Kabupaten Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.27 sebagaimana tersebut di atas, jumlah cagar budaya yang dilestarikan selama tahun 2014-2018 tidak mengalami perkembangan, sebab penambahan maupun pengurangan cagar budaya memerlukan verifikasi dari Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Budaya dan Pariwisata serta UNESCO.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya, diantaranya:

1. Pengelolaan Kekayaan Budaya;
2. Pengembangan Nilai Budaya; dan
3. Pengelolaan Keragaman Budaya,

Permasalahan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Kekayaan, nilai dan keberagaman budaya yang berkembang apabila tidak dirawat dan dipelihara akan mengakibatkan *culture lag (kemandegan budaya)*, dan menjadi ancaman desintegrasi bangsa; dan
2. Kurangnya pembinaan yang kontinu bagi pengelolaan kekayaan budaya, nilai budaya, dan keberagaman budaya.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi pamong budaya, sesuai dengan dinamika yang berkembang; dan
- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi untuk pengembangan dan pengelolaan budaya; dan
- c. Pemberian penghargaan yang sepadan bagi pelaku seni dan budaya yang berprestasi.

8. Sasaran Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan;

Upaya Pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan dengan melakukan berbagai event daerah. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan budaya baca masyarakat. Adapun capaian sasaran Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan disajikan pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase Kenaikan kunjungan masyarakat	4	5	65,79	1.315,8	5	1.315,8

Pada Tahun 2018 jumlah perpustakaan desa sebanyak 43 unit dan perpustakaan kelurahan sebanyak 2 unit. Layanan perpustakaan keliling sebanyak 5 unit yang melayani 26 kecamatan di Kabupaten Klaten, secara bergilir sesuai jadwal yang ditetapkan. Terdapat juga layanan perpustakaan keliling dengan 5 unit sepeda motor untuk merolling buku pada daerah yang tidak terjangkau bus keliling. Adapun perkembangan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Klaten tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29.

Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan
di Kabupaten Klaten Tahun 2014-2018

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah koleksi perpustakaan	Judul	38.481	41.464	43.979	44.687	45.362
2	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	7.648	7.673	40.003	41.225	68.346

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2019

Perkembangan jumlah perpustakaan desa selama tahun 2014-2018 disajikan pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30.

Perkembangan Jumlah Perpustakaan Desa
di Kabupaten Klaten Tahun 2014 – 2018

NO	Tahun	Jumlah Perpustakaan
(1)	(2)	(3)
1	2018	45
2	2017	45
3	2016	44
4	2015	44
5	2014	42

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2019.

Berdasarkan Tabel 3.30. sebagaimana tersebut di atas, perkembangan lima tahun terakhir (tahun 2014-2018) bahwa terdapat peningkatan jumlah perpustakaan yang didirikan di desa-desa setiap tahunnya. Namun demikian jumlah perpustakaan desa sampai dengan tahun terakhir hanya sejumlah 45 desa dari 391 desa (atau baru 11,50% dari jumlah desa).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait upaya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis "Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan", dengan program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke Perpustakaan, diantaranya:

1. Terbatasnya buku literatur yang diminati/dibutuhkan pengunjung: dan
2. Kurang representatifnya ruang baca, sarana dan prasarana perpustakaan.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan pengunjung perpustakaan, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pengelola perpustakaan, sesuai dengan dinamika yang berkembang; dan
- b. Menciptakan lingkungan perpustakaan yang representatif; dan
- c. Menghimpun buku-buku masyarakat yang memiliki nilai untuk dikelola sebagai museum buku..

9. Sasaran Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah;

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien bisanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur dari tingkat profesionalisme aparatur Pemerintah daerah, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *road map* reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah daerah sebagaimana Tabel 3.31.

Tabel 3.31.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Indeks Profesionalitas ASN	-	82,06	74	90,18	87,36	84,71

**) catatan: Kondisi awal belum terisi karena pengisian Indeks Profesionalitas ASN dimulai tahun 2017.*

Tuntutan profesionalitas aparatur sipil negara merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja Pemerintah sebagai kewajiban Pemerintah yang harus bisa diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan Pemerintah. Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2018 merupakan cerminan sejauh mana integritas ASN dalam menjalankan mandat.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah daerah. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatnya profesionalisme aparatur Pemerintah daerah terdiri dari 2 (dua) program, diantaranya:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Permasalahan :

- a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk menempati jabatan strategis di perangkat daerah tertentu; dan
- b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang kredibel.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif.

10. Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah;

Untuk mewujudkan sasaran “*Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah*” sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur Opini BPK terhadap LKPD.

Opini BPK terhadap LKPD merupakan penilaian atas kinerja keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dan kinerja keuangan Pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan baik. Dasar penilaian BPK berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa keuangan, berdasarkan ketentuan ini pemeriksaan dilakukan secara periodik setiap tahun, dan pemeriksaan ini mencakup neraca, laporan realisasi anggaran, laporan kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat, terdiri atas: Tidak Wajar (TD), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun capaian sasaran “*Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah*” sebagaimana Tabel 3.32.

Tabel 3.32.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WDP	WDP	100	WTP	75

Realisasi atas target kinerja keuangan menunjukkan hasil kinerja sangat tinggi, atau menghasilkan opini penilaian *WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)*, satu prestasi yang belum pernah diperoleh selama ini. Kinerja ini merupakan komitmen bersama disemua jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan aspek akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan, transparansi penggunaan anggaran, dan tertib administrasi sebagai bagian dari fakta integritas yang telah dibangun dan diciptakan penyelenggara negara. Adapun Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013–2017 disajikan pada Tabel 3.33

Tabel 3.33.

Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2013–2017

Tahun	Opini BPK	Keterangan
2013	WDP	Paragraf penjelas berupa: penataan usaha persediaan di 43 SKPD tidak sesuai dengan pengelolaan aset tetap tidak tertib, realisasi intensif dan biaya pemungutan pajak daerah melebihi ketentuan, penganggaran dan pelaksanaan bantuan keuangan tidak sesuai ketentuan, serta sub pekerjaan speaker pembangunan Masjid Agung tahap II tidak sesuai spesifikasi.
2014	WDP	Paragraf penjelas berupa : Belum memadainya pengelolaan aset tetap dan pengelolaan retribusi izin gangguan dan retribusi izin mendirikan bangunan, kurang memadainya pengelolaan penempatan dana cadangan serta kelebihan pembayaran atas selisih harga timpang dan kekurangan volume pekerjaan.
2015	WTP	Paragraf penjelas berupa: berlalutnya pekerjaan pembangunan menara Masjid Agung, belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya pada sekolah-sekolah, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, serta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pegawai ASN.

2016	WDP	Paragraf penjelas berupa: belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya pada sekolah-sekolah, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, serta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pegawai ASN.
2017	WDP	Paragraf penjelas berupa: belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya perangkat daerah dan pengelolaan dana BOS.

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2019.

*) Catatan: Opini BPK tahun 2018 belum keluar.

Hasil penilaian sebagaimana tersebut pada Tabel 3.33. di atas, berdasarkan atas Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan, serta penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan, serta penyajian laporan keuangan secara menyeluruh yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2018, dengan penguatan program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permasalahan :

- a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk menempati jabatan strategis di perangkat daerah tertentu; dan
- b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang kredibel.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN yang mengelola barang dan jasa daerah; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

11. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD;

Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah mendukung tugas pokok DPRD, dan membuat laporan administrasi dan keuangan. Adapun capaian sasaran "Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD" tahun 2018 sebagaimana Tabel 3.34.

Tabel 3.34.

**Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun 2018			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2018 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	70	85	93,10	109,53	85	109,53

Mengacu pada pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, serta Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2018 maka capaian kinerja organisasi yang telah dilaksanakan Sekretariat DPRD sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana Tabel 3.35.

Tabel 3.35.

**Capaian Kinerja Organisasi
Berdasarkan Pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021
Sampai dengan Tahun 2018**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (n-1)	Tahun 2018			Target Renstra	
				Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	% capaian thd target akhir Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=[(4)+(6)]/(8)*100
1	Menyempurnakan sistem dan prosedur pelayanan kepada DPRD	Jumlah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang ditetapkan	123	56	56	100	347	51,59
2	Meningkatnya kualitas layanan legislasi DPRD	Jumlah produk legislasi DPRD	35	28	28	100	140	45
		Jumlah produk pengawasan DPRD	28	14	14	100	84	50
		Jumlah produk penganggaran yang dihasilkan	8	4	4	100	18	66,67

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang sifatnya progresif, diperoleh hasil:

- a. Jumlah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang ditetapkan
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Jumlah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD yang ditetapkan pada tahun 2018 capaian kinerjanya sebesar 100% (atau dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ***Sangat Baik***). Jumlah Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD sampai dengan tahun 2018 sebanyak 179 produk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD atau Persentase capaian terhadap target akhir Renstra sudah mencapai 51,59%.
- b. Jumlah Produk Legislasi DPRD.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Jumlah produk legislasi DPRD pada tahun 2018 capaian kinerjanya sebesar 100% (dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ***Sangat Baik***). Jumlah produk legislasi DPRD sampai dengan tahun 2018 sebanyak 63 produk legislasi DPRD (Perda) atau Persentase capaian terhadap target akhir Renstra sudah mencapai 45%.
- c. Jumlah Produk Pengawasan DPRD.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah produk pengawasan DPRD pada tahun 2018 capaian kinerjanya sebesar 100% (dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ***Sangat Baik***). Jumlah produk pengawasan DPRD sampai dengan tahun 2018 sebanyak 42 Obyek pengawasan (Obrik) atau Persentase capaian terhadap target akhir Renstra sudah mencapai 50%.
- d. Jumlah Produk Penganggaran Yang Dihasilkan
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator Jumlah Produk Penganggaran yang Dihasilkan pada tahun 2018 capaian kinerjanya sebesar 100% (dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ***Sangat Baik***). Jumlah produk penganggaran yang dihasilkan sampai dengan tahun 2018 sebanyak 12 produk penganggaran atau persentase capaian terhadap target akhir Renstra sudah mencapai 66,67%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait "*Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD*" pada tahun 2018, dengan penguatan program peningkatan kapasitas DPRD.